PERATURAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN PERATURAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR 26 TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
RKPD TAHUN 2020
KABUPATEN BARITO KUALA

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i

DAFTAR TABEL ii

I. PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2. Dasar Hukum Penyusunan 2

1.3.Hubungan Antar Dokumen 4

1.4.Sistematika Dokumen 5

1.5.Maksud dan Tujuan 6

II. EVALUASI HASIL RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN KEDUA

2.1. Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2020 8

2.2. Evaluasi Kinerja RKPD Tahun 2020 Sampai Triwulan II Tahun 2020 14

III. KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH 29

3.1. Indikator Makro Pembangunan Nasional 29

3.2. Kerangka Ekonomi Daerah Tahun 2020 30

IV. SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH 40

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional 60

4.2. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Jangka Menengah Kalimantan Selatan Tahun 2016 - 2021 76

4.3. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022 77

4.4. Prioritas dan Sasaran Rencana Kerja Pembangunan Tahun 2020 78

V. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH 85

VI. PENUTUP 87

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bahwa berdasarkan laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barito Kuala Tahun 2020 dari bulan Januari sampai dengan akhir bulan Juni Tahun 2020, terdapat adanya ketidaksesuaian, seperti:

a. Perkembangan keadaan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
b. Adanya Pandemi Covid yang berdampak global, nasional dan regional dimana pemerintah pusat memberlakukan kebijakan nasional dalam rangka *refocusing* APBN dan APBD untuk penanggulangan Covid-19.
c. Perubahan kegiatan dalam bentuk; pergeseran kegiatan antar perangkat daerah, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu indikatif, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran yang akan di tindaklanjuti dengan mapping program di tahun 2021.

Akibat perubahan tersebut perlu dilakukan penataan ulang prioritas dan plafon anggaran sebagai akibat dari berbagai bentuk pergeseran program kegiatan dan atau program kegiatan baru yang diusulkan perangkat daerah untuk ditampung dalam Perubahan RKPD Tahun 2020.

Memperhatikan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengamanatkan bahwa penyusunan RAPBD berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara dan ketentuan Pasal 25 ayat(2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa RKPD menjadi pedoman penyusunan RAPBD.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 Tahun 2017 pasal 343 menjelaskan bahwa perubahan RKPD dapat dilakukan apabila : (1) hasil evaluasi tahun berjalan menunjukan adanya ketidak sesuaian dengan perkembangan keadaan yang

meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi makro dan keuangan daerah serta rencana program dan kegiatan tahun berkenaan. (2) keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Maka untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 26 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barito Kuala Tahun 2020 perlu dilakukan perubahan/penyesuaian, guna menampung seluruh perubahan dalam pendapatan, belanja, serta defisit dan pembiayaan anggaran, yang terjadi baik karena perubahan asumsi makro, maupun untuk menampung tambahan belanja prioritas yang belum terakomodasi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagai akibat dari perubahan prioritas dan target-target kinerja kabupaten yang telah ditetapkan pada RPJMD Kabupaten Barito Kuala tahun 2017-2022.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan RKPD Perubahan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
d. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

f. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

g. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-2019) dan / Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan.

h. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 Tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendatapatan Dan Belanja Negara Tahun 2020;

i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan DaerahTentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 550);

l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;

m. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 – 2019;

n. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 03 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2005-2025;

o. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017 – 2022;

p. Peraturan Presiden Nomor 59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;

q. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang dan Jasa Barjas Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid 19;

r. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid 19;

s. PMK Nomor 76/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Cadangan DAK Fisik 2020;

t. PP Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;

u. Permendagri Nomor 100 tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

v. Permendagri Nomor 20 tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) di Lingkup Pemerintah Daerah;

w. Peraturan terkait penanganan kemiskinan;

x. Peraturan-peraturan terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Rencana Kerja Pemerintah Daerah – Perubahan(RKPD-P) Kabupaten Barito Kuala Tahun 2020 merupakan penjabaran yang lebih nyata, operasional, terukur dan

merupakan tahun pelaksanaan ketiga dari RPJMD Kabupaten Barito Kuala tahun 2017–2022. RKPD Perubahan merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah yang memuat kebijakan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi setiap perangkat daerah yang dikoordionasikan melalui forum perangkat daerah. Sebagai bagian dari langkah pembaharuan dalam penyusunan RKPD Perubahan Tahun 2020 dan Renja perangkat daerah setiap program dan kegiatan yang tercantum dalam RKPD Perubahan Tahun 2020 dan Renja perangkat daerah harus diselaraskan dengan dokumen- dokumen perencanaan baik RPJPD, RPJMD, maupun dokumen perencanaan Provinsi dan Nasional.

RKPD Perubahan Kabupaten Kabupaten Barito Kuala Tahun 2020 merupakan landasan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum APBD-Perubahan (KUA-P) dan rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) tahun 2020.

1.4 Sistematika Dokumen

Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Perubahan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2020 disajikan berdasarkan Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014, yaitu:

BAB I. PENDAHULUAN

Memuat /menjelaskan maksud, tujuan dan dasar pertimbangan perubahan disertai dengan gambaran tentang perubahan kerangka ekonomi daerah.

BAB II. EVALUASI HASIL RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN KEDUA

Memuat kompilasi hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2020 sampai dengan triwulan II Tahun 2020.

BAB III. KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Menjelaskan arah kebijakan pembangunan ekonomi tahun 2020 baik tingkat Provinsi Kalimantan Selatan maupun Kabupaten Barito Kuala, proyeksi dan tantangan pembangunan ekonomi Tahun 2021 serta menjelaskan arah kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan Tahun 2021 serta pendanaan pembangunan lainnya.

BAB IV. SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Menjelaskan Visi dan Misi yang mencakup tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan, indikator dan target kinerja pembangunan daerah tahun 2017-2022 sesuai periodesasi RPJMD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022, serta menjelaskan keterkaitan prioritas dan sasaran Pembangunan Nasional dan Provinsi Kalimantan Selatan, isu strategis, prioritas pembangunan daerah yang berasal dari program pembangunan daerah RPJMD Tahun 2017-2022 pada Tahun berkenaan.

BAB V. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Menjelaskan secara rinci rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana RKPD Tahun 2020. dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD serta pagu indikatornya.

BAB VI. PENUTUP

Memuat hal-hal yang dianggap perlu sesuai dengan kebutuhan.

1.5 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan RKPD Perubahan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2020 adalah memberikan pedoman dan arah pembangunan bagi Perangkat Daerah dalam mendukung terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017 – 2022.

Tujuan penyusunan RKPD Perubahan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Menjabarkan visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022 dalam program dan kegiatan pembangunan yang rinci, terarah,terukur dan dapat dilaksanakaan pada Tahun 2020, mengingat pada RKPD tahun 2020 belum diakomodir;
2. Menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Tahun 2020 yang selanjutnya akan dijabarkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020;
3. Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional; memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunan daerah;
4. Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan wajib dan pilihan pemerintahan daerah melalui capaian target kinerja program dan kegiatan pembangunan;
5. Memperkuat koordinasi, integrasi, sinergi dan sinkronisasi pembangunan baikantar perangkat daerah, antara Pemerintah Kabupaten Barito Kuala dengan PemerintahProvinsi Kalimantan Selatan Selatan, dan antara Pemerintah Kabupaten Barito Kualadengan Pemerintah Nasional;
6. Menciptakan iklim pemerintahan yang parsitipatif, responsif, dan kondusif dalammelaksanakan pembangunan yang berkelanjutan ;
7. Menjadi acuan dalam pengembangan kerjasama dan kemitraan antara PemerintahKabupaten Barito Kuala, swasta dan masyarakat.

Perubahan RKPD Tahun 2020 Kabupaten Barito Kuala perlu dilakukan didasarkan atas adanya hasil evaluasi pelaksanaan dalam tahun berjalan (2020) yang menunjukkan adanya ketidak sesuaian dengan perkembangan keadaan. Adapun Dasar Pertimbangan Perubahan RKPD Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Telah ditetapkannya RPJMD Kabupaten Barito Kuala tahun 2017-2022 yang harus segera dijadikan acuan dalam perencanaan pembangunan jangka pendek (1 tahun) dan adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
2. Adanya Pandemi Covid-19 yang menyebabkan pemerintah mengeluarkan kebijakan nasional untuk mengalokasikan anggaran yang lebih besar untuk bidang kesehatan serta dalam rangka penanggulangan dampak ekonomi dan social dari kejadian Pandemi ini..
3. Adanya keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;
4. Adanya pergeseran program, kegiatan dan bahkan pergeseran anggaran antar perangkat daerah, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

BAB II. EVALUASI HASIL RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN KEDUA

2.1 Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2020

Berdasarkan Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 26 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barito Kuala Tahun 2020, terdapat beberapa program prioritas yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Barito Kuala dalam rangka pencapaian Visi dan Misi "Batola Setara". Program dan kegiatan perangkat daerah pada RKPD Perubahan tahun 2020 mengalami perubahan yang signifikan akibar adanya Pandemi Covid-19 yang juga terjadi diwilayah Kabupaten Barito Kuala, sehingga kebijakan pembangunan diarahkan pada penanganan wabah Covid-19 dan prioritas penanganan dampak lanjutan terhadap sosial ekonomi masyarakat.

RKPD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2020 berisi kebijakan pembangunan baik yang terkait dengan kebijakan APBD maupun yang diarahkan untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Dari kebijakan pembangunan tersebut, kemudian dirumuskan prioritas pembangunan yang hendak ditempuh pada Tahun 2020. Rumusan kebijakan pada APBD 2020 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 26 Tahun 2019, ditetapkan 4 (empat) prioritas pembangunan Barito Kuala tahun 2020, yaitu :

1. **Percepatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dengan penerapan prinsif pembangunan berkelanjutan**.

   Dalam melaksanakan prioritas percepatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan ditetapkan dengan empat sasaran pembangunan prioritas:

   1) Peningkatan Kualitas Jalan dan Jembatan
      (1) Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
      (2) Program Rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan
   2) Peningkatan Akses Pelayanan Air Bersih
      (1) Program penyediaan dan pengolahan air baku
   3) Peningkatan Kualitas Permukiman dan Perumahan

(1) Program pengembangan perumahan
(2) Program lingkungan sehat perumahan
(3) Program perbaikan perumahan akibat bencana sosial.

4) Peningkatan Kualitas daya dukung lingkungan
   (1) Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
   (2) Program peningkatan pengendalian polusi
   (3) Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan
5) Peningkatan kualitas pengelolaan sanitasi limbah
   (1) Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah
6) Revitalisasi jaringan irigasi
   (1) Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya
7) Peningkatan kualitas sarana dan prasarana perhubungan
   (1) Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
   (2) Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasaran dan Fasilitas LLAJ
   (3) Program peningkatan pelayanan angkutan
   (4) Program Peningkatan dan Pengamaanan lalulintas
8) Peningkatan kualitas infrastruktur ekonomi
   (5) Program pengembangan wilayah perbatasan
   (2) Program pengembangan wilayah transmigrasi
   (3) Program perencanaan tata ruang
   (4) Program pengelolaan informasi publik
   (5) Program pengembangan fasilitas kewajiban pelayanan universal/ubniversal service obligation (KPU/USO).
   (6) Program pengembangan infrastruktur TIK
   (7) Program pengembangan Ekosistem dan Tata Kelola e-Gov.
   (8) Program penataan pengausaan, pemilikan penggunaan dan pemanfaatan tanah.
   (9) Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa.
   (10) Program kerjasama informasi dan media massa.

2. Peningkatan Produktifitas dan Daya Saing Ekonomi

Dalam melaksanakan prioritas peningkatan produktivitas dan daya saing ekonomi ditetapkan yaitu:

1) Peningkatan Pertumbuhan sektor pertanian
   (1) Program peningkatan Teknologi pertanian/perkebunan
   (2) Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan
   (3) Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan
   (4) Program peningkatan produksi hasil peternakan
   (5) Program pengembangan budidaya perikanan
   (6) Program pengembangan perikanan tangkap
   (7) Program Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak
2) Peningkatan Ketahanan Pangan.
   (1) Program peningkatan ketahanan pangan
3) Peningkatan Peran industry kecil dan menengah.
   (1) Program penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif
   (2) Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah
4) Peningkatan peran koperasi
   (1) Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi
5) Peningkatan nilai investasi
   (1) Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
   (2) Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
   (3) Program Penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah
6) Peningkatan daya saing tenaga kerja
   (1) Peningkatan kualitas dan rpoduktivitas tenaga kerja
7) Peningkatan pengelolaan potensi ekonomi dan keunggulan local
   (1) Program pengembangan sentra sentra industry
8) Peningkatan kesempatan kerja dan peluang berusaha
   (1) Program peningkatan kesempatan kerja

3. Peningkatan kesejahteraan dan kualitas sumberdaya manusia

Dalam melaksanakan prioritas peningkatan kesejahteraan dan kualitas sumberdaya manusia ditetapkan yaitu:

1) Peningkatan rata-rata lama sekolah.
   (1) Program pendidikan anak usia dini
   (2) Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahunProgram pendidikan formal
   (3) Program peningkatan mutu pendidikan dan tenaga pendidikan
   (4) Program peningkatan budaya baca dan pembinaan perpustakaan
2) Penurunan prevalensi stunting
   (1) Program upaya kesehatan masyarakat
   (2) Program obat dan pembekalan kesehatan
   (3) Program perbaikan gizi masyarakat
   (4) Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular
   (5) Program pelayanan kesehatan penduduk miskin
   (6) Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya
   (7) Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak
   (8) Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata
   (9) Program standarisasi pelayanan kesehatan
   (10) Program pengadaan, peningkatan sara parasana rumah sakit/rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata
3) Penanganan dan penurunan PMKS
   (1) Program pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT) dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya
   (2) Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial
   (3) Program pembinaan anak terlantar
   (4) Program perlindungan dan jaminan sosial
   (5) Program keluarga harapan
   (6) Program sistem layanan rujukan terpadu (SLRT)

(7) Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial

4) Percepatan kabupaten layak anak

(1) Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak

(2) Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan

(3) Program keluarga berencana

(4) Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak

(5) Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri

5) Peningkatan dan pengembangan destinasi wisata

(1) Program pengembangan destinasi wisata

6) Peningkatan kepemilikan kartu identitas anak

(1) Program penataan administrasi kependudukan

7) Penurunan tingkat pelanggaran K3

(1) Program pemeliharaan kamtibmas dan pencegahan tindak criminal

(2) Program peningkatan pengendalian dan kenyamanan lingkungan

8) peningkatan kesejahteraan dan daya saing masyarakat

(3) Program pengelolaan kekayaan budaya

(1) program pengembangan dan keserasian kebijakan pemuda

(2) Program peningkatan sarana dan prasarana olah raga

4. Reformasi birokrasi, peningkatan pelayanan publik, peningkatan kinerja perangkat daerah dan penegakan hukum.

Dalam melaksakan prioritas reformasi birokrasi, peningkatan pelayanan publik, peningkatan kinerja perangkat daerah dan penegakan hukum ditetapkan dua sasaran yaitu:

1) Peningkatan kualitas layanan publik.

(1) Program peningkatan layanan publik

(2) Program pendidikan politik masyarakat

(3) Program peningkatan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

(4) Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian

pelaksanaan kebijakan kepala daerah

(5) Program pencegahan dini dan penanggulangan bencana alam

(6) Program kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran

(7) Program peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan agama dan pembinaan kerukunan beragama

2) Penguatan SAKIP

(1) Program peningkatan profesianalisme tenaga pemeriksa dan apparatur pengawas

(2) Program peningkatan layanan pengadaan barang dan jasa

(3) Program penataan peraturan perundang undangan

(4) Program perencanaan pembangunan daerah

(5) Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah

(6) Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah

(7) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

(8) Program peningkatan manajemen aset/barang milik daerah

(9) Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Program Perencanaan Sosial dan Budaya Program Perencanaan Fisik dan Prasarana Program pembangunan infrastruktur perdesaaan

(11) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

3) Sinkronisasi dana desa

(1) Program peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan

(2) Program pengembangan lembaga ekonomi perdesaan

(3) Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa

4) Peningkatan disiplin ASN

(1) Program pendidikan kedinasan

(2) Program pembinaan dan pengembangan aparatur

Dalam mewujudkan peningkatan prioritas reformasi birokrasi, peningkatan pelayanan publik, peningkatan kinerja perangkat daerah dan penegakan hukum didukung oleh 37 program prioritas dan 1.273 kegiatan.

2.2 Evaluasi Kinerja RKPD Tahun 2020 Sampai Triwulan II Tahun 2020

Evaluasi Kinerja Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barito Kuala tahun 2020 , sekaligus sebagai evaluasi capaian kinerja RPJMD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022 berdasarkan sasaran pembangunan daerah untuk tahun 2020 sebagai tahun ketiga dari periode Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Barito Kuala.

Berikut adalah capaian kinerja berdasarkan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Barito Kuala tahun 2020 sampai dengan bulan Juni tahun 2020.

Tabel 1. Capaian Kinerja RKPD Tahun 2020

No.	Sasaran	Indikator	Satuan	Target	Capaian	Perangkat Daerah Pelaksana
1	Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,45	)*	1. Dinas Pendidikan 2. Dinas Kesehatan 3. Dinas Perputakaan dan Arsip 4. Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak 5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa 6. Dinas Pemuda Olah Raga Budaya dan Pariwisata 7. RSUD H. Abdul Azis
		Angka Harapan Hidup	Tahun	65,6	)*	
2	Meningkatnya Kinerja perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Prosentasi pertumbuhan sektor pertanian	Persen	1,78	)*	1. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan 2. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura 3. Dinas Perkebunan dan Peternakan 4. Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan 5. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 6. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu 7. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah 8. Sekretariat Daerah
		Indeks Gini	Indeks	0,36	)*	
		Peningkatan PAD	Pesen	5	)*	
		Tingkat Kemiskinan	Persen	5,02	5,13*	
		Tingkat Pengangguran	Persen	1,05	3,99*	
		PDRB Perkapita	Juta Rupiah	24,58	24,4*	

						9. Dinas Pemuda Olah Raga Budaya dan Pariwisata 10. Bappelitbang 11. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 12. Dinas Pemuda Olah Raga Budaya dan Pariwisata 13. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 14. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 15. Dinas Sosial 16. Dinas Pendidikan 17. Dinas Kesehatan 18. Dinas Pemberdayaan Masayarakat dan Pemerintahan Desa
3	Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Perdesaan dan Perkotaan	Prosentase ketersediaan infrastruktur perdesaan Prosentase ketersediaan infrastruktur perkotaan	Persen Persen	60 45	33,95* 41,17*	1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 3. Dinas Perhubungan 4. Dinas Komunikasi dan Informatika
4	Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	50,76	52,77*	1. Dinas Lingkungan Hidup 2. Dinas PUPR 3. Dinas Kesehatan 4. Bappelitbang
5	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Menjaga	Tingkat Penyelesaian K3 (ketentraman, ketertiban, keindahan)	Persen	100	100	1. Satuan Polisi Pamong Praja 2. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

	Ketertiban dan Keamanan					3. Badan Penanggulangan Bencana Daerah 4. Sekretariat Daerah 5. Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
6	Meningkatnya Pelayanan Publik terutama yang berkaitan dengan pelayanan Dasar	Indeks kepuasan masyarakat	Indeks	95	82,45*	1. Dinas Pendidikan 2. Dinas Kesehatan 3. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 4. Sekretariat Daerah 5. Bapekdiklat 6. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 7. Kecamatan
7	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Pemerintahan	Nilai akuntabilitas kinerja pemerintahan	Nilai SAKIP	73,55	)*	1. Sekretariat Daerah 2. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan 3. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 4. Badan Pengeloaan Pajak dan Retribusi Daerah 5. Inspektorat
8	Meningkatnya Profesionalitas Aparatur	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	65	)*	1. Sekretariat Daerah 2. Sekretariat DPRD 3. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan 4. Inspektorat 5. Dinas Komonikasi dan Informatika 6. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

*Angka Tahun 2019

)*Angka belum tersedia

Evaluasi tingkat capaian kinerja rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) Kabupaten Barito Kuala tahun 2020 berdasarkan capaian Realisasi Fisik dan Keuangan pelaksanaan APBD TA 2020 menurut SKPD sebagaimana tersaji pada Tabel 2 berikut ini :

NO	SKPD	PAGU (Rp.)	BELANJA TIDAK LANGSUNG (Rp.)	BELANJA LANGSUNG (Rp.)	PENCAPAIAN KINERJA KEGIATAN						JUMLAH TOTAL		
					BELANJA TIDAK LANGSUNG			BELANJA LANGSUNG					
					Fisik (%)	Keuangan (%)	Keuangan (Rp.)	Fisik (%)	Keuangan (%)	Keuangan (Rp.)	Fisik (%)	Keuangan (%)	Keuangan (Rp.)
1	Dinas Pendidikan	393.559.622.486,00	307.432.748.542,00	86.126.873.944,00	36,00	35,62	109.498.912.806,00	12,44	12,61	10.862.210.756,00	24,22	30,58	120.361.123.562,00
2	Dinas Kesehatan	116.040.308.306,00	56.509.469.191,00	59.530.839.115,00	24,00	23,13	13.070.256.249,00	0,00	16,61	9.888.067.667,00	12,00	19,78	22.958.323.916,00
3	RSUD. H. Abdul Aziz Marabahan	48.442.233.748,00	16.219.327.627,00	32.222.906.121,00	11.876	41,59	6.745.524.191,00	198,68	17,82	5.740.528.844,00	6.037	25,78	12.486.053.035,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	195.440.142.057,00	8.090.106.215,00	187.350.035.842,00	52,00	36,73	2.971.604.293,00	35,55	31,24	58.526.339.911,00	43,78	31,47	61.497.944.204,00
5	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	10.999.925.447,00	2.410.790.055,00	8.589.135.392,00	52,00	39,13	943.451.397,00	20,47	11,73	1.007.628.282,00	36,24	17,74	1.951.079.679,00
6	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	4.153.206.335,00	2.203.247.635,00	1.949.958.700,00	0,00	46,70	1.028.962.880,00	0,00	13,73	267.793.226,00	0,00	31,22	1.296.756.106,00
7	Satuan Polisi Pamong Praja	8.143.502.202,00	6.618.532.682,00	1.524.969.520,00	0,00	34,83	2.305.476.800,00	0,00	21,42	326.703.847,00	0,00	32,32	2.632.180.647,00
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.194.197.008,00	1.059.499.008,00	1.134.698.000,00	8,00	25,72	272.540.880,00	7,18	6,60	74.915.971,00	7,59	15,84	347.456.851,00
9	Dinas Sosial	5.501.759.954,00	2.616.996.027,00	2.884.763.927,00	43,20	40,86	1.069.204.440,00	10,42	13,10	378.041.140,00	26,81	26,31	1.447.245.580,00

10	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	8.569.287.893,00	2.746.120.693,00	5.823.167.200,00	36,00	43,29	1.188.743.648,00	7,40	28,33	1.649.488.526,00	21,70	33,12	2.838.232.174,00
11	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	10.283.935.617,00	2.638.584.417,00	7.645.351.200,00	40,17	36,99	976.105.981,00	24,62	22,90	1.750.735.279,00	32,39	26,52	2.726.841.260,00
12	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	9.879.165.313,00	4.378.522.213,00	5.500.643.100,00	50,00	44,12	1.931.753.473,00	60,41	18,64	1.025.537.651,00	55,20	29,93	2.957.291.124,00
13	Dinas Lingkungan Hidup	7.236.605.636,00	3.091.441.786,00	4.145.163.850,00	44,59	44,11	1.363.568.716,00	66,76	16,97	703.251.430,00	55,67	28,56	2.066.820.146,00
14	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	6.839.138.489,00	2.757.200.649,00	4.081.937.840,00	48,00	44,38	1.223.742.856,00	22,81	19,16	782.176.116,00	35,40	29,33	2.005.918.972,00
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	4.576.834.970,00	2.185.607.395,00	2.391.227.575,00	48,00	45,40	992.187.711,00	58,44	26,36	630.220.911,00	53,22	35,45	1.622.408.622,00
16	Dinas Perhubungan	6.597.104.122,00	4.216.540.844,00	2.380.563.278,00	44,00	46,44	1.958.235.180,00	6,19	11,60	276.263.270,00	25,09	33,87	2.234.498.450,00
17	Dinas Komunikasi dan Informatika	5.812.033.373,00	2.989.136.743,00	2.822.896.630,00	48,00	35,61	1.064.398.461,00	51,90	19,56	552.240.586,00	49,95	27,82	1.616.639.047,00
18	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	11.732.352.633,00	3.753.669.563,00	7.978.683.070,00	52,00	44,94	1.686.773.943,00	15,14	11,34	904.667.920,00	33,57	22,09	2.591.441.863,00

19	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3.549.632.906,00	2.370.217.006,00	1.179.415.900,00	52,00	44,18	1.047.051.361,00	26,76	18,09	213.359.663,00	39,38	35,51	1.260.411.024,00
20	Dinas Kepemudaan, Olah Raga, Budaya dan Pariwisata	24.977.348.271,00	2.654.143.206,00	22.323.205.065,00	50,00	41,30	1.096.220.285,00	37,92	30,54	6.816.570.048,00	43,96	31,68	7.912.790.333,00
21	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.881.056.722,00	2.470.562.127,00	410.494.595,00	56,00	41,09	1.015.057.843,00	53,07	54,47	223.615.720,00	54,54	42,99	1.238.673.563,00
22	Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura	27.726.252.867,00	16.248.030.698,00	11.478.222.169,00	52,00	47,19	7.667.082.384,00	57,90	14,33	1.644.328.672,00	54,95	33,58	9.311.411.056,00
23	Dinas Perkebunan dan Peternakan	6.815.847.609,00	2.643.476.309,00	4.172.371.300,00	52,00	40,38	1.067.545.141,00	36,51	8,86	369.784.983,00	44,25	21,09	1.437.330.124,00
24	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)	14.123.220.195,00	14.123.220.195,00	0,00	51,36	50,19	7.088.618.714,00	0,00	8,86	0,00	25,68	21,09	7.088.618.714,00
25	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	563.097.400,00	563.097.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,86	0,00	0,00	21,09	0,00
26	Sekretariat Daerah	51.307.424.050,00	30.215.304.200,00	21.092.119.850,00	52,00	47,48	14.345.963.172,00	58,68	36,29	7.654.677.645,00	55,34	42,88	22.000.640.817,00
27	Sekretariat DPRD	28.013.101.122,00	2.656.740.192,00	25.356.360.930,00	39,27	45,00	1.195.418.833,00	39,22	23,38	5.928.942.840,00	39,24	25,43	7.124.361.673,00
28	Kecamatan Tabunganen	862.633.770,00	548.303.670,00	314.330.100,00	50,00	46,06	252.528.087,00	32,06	31,19	98.035.555,00	41,03	40,64	350.563.642,00

29	Kecamatan Tamban	1.030.302.930,00	514.281.930,00	516.021.000,00	0,00	46,10	237.076.194,00	41,05	18,47	95.322.590,00	20,52	32,26	332.398.784,00
30	Kecamatan Mekarsari	1.227.628.690,00	469.115.790,00	758.512.900,00	50,00	50,57	237.230.355,00	15,73	22,87	173.462.380,00	32,87	33,45	410.692.735,00
31	Kecamatan Anjir Pasar	966.470.130,00	594.195.030,00	372.275.100,00	24,00	27,41	162.874.566,00	22,23	14,48	53.902.438,00	23,11	22,43	216.777.004,00
32	Kecamatan Anjir Muara	1.092.230.330,00	519.591.930,00	572.638.400,00	50,00	63,30	328.912.121,00	57,51	56,45	323.258.873,00	53,76	59,71	652.170.994,00
33	Kecamatan Alalak	5.976.287.824,00	1.563.846.465,00	4.412.441.359,00	50,00	58,18	909.863.791,00	22,95	18,93	835.125.279,00	36,48	29,20	1.744.989.070,00
34	Kecamatan Mandastana	1.096.609.930,00	619.215.330,00	477.394.600,00	50,00	54,81	339.395.373,00	63,88	27,31	130.360.645,00	56,94	42,84	469.756.018,00
35	Kecamatan Belawang	768.917.950,00	458.322.150,00	310.595.800,00	48,00	57,45	263.313.663,00	38,79	29,25	90.852.261,00	43,39	46,06	354.165.924,00
36	Kecamatan Wanaraya	771.062.798,00	542.390.010,00	228.672.788,00	24,00	44,25	240.006.536,00	36,18	50,10	114.559.899,00	30,09	45,98	354.566.435,00
37	Kecamatan Barambai	1.002.141.770,00	533.183.670,00	468.958.100,00	50,00	46,95	250.336.439,00	39,77	29,67	139.125.000,00	44,89	38,86	389.461.439,00
38	Kecamatan Rantau Badauh	810.108.770,00	524.036.370,00	286.072.400,00	42,86	57,28	300.188.185,00	35,28	23,99	68.625.904,00	39,07	45,53	368.814.089,00
39	Kecamatan Cerbon	743.380.730,00	484.671.330,00	258.709.400,00	41,67	58,00	281.125.141,00	48,14	27,38	70.822.278,00	44,90	47,34	351.947.419,00
40	Kecamatan Bakumpai	2.240.566.825,00	733.381.935,00	1.507.184.890,00	41,67	44,93	329.473.355,00	9,71	7,86	118.498.000,00	25,69	19,99	447.971.355,00
41	Kecamatan Marabahan	3.889.078.131,00	954.872.280,00	2.934.205.851,00	50,00	53,82	513.940.304,00	10,80	6,68	196.023.529,00	30,40	18,26	709.963.833,00
42	Kecamatan Tabukan	850.038.610,00	566.199.510,00	283.839.100,00	21,43	23,09	130.741.812,00	17,21	15,81	44.885.150,00	19,32	20,66	175.626.962,00
43	Kecamatan Kuripan	1.321.994.310,00	565.070.010,00	756.924.300,00	50,00	46,29	261.570.609,00	52,96	24,64	186.524.542,00	51,48	33,90	448.095.151,00
44	Kecamatan Jejangkit	724.223.090,00	470.326.590,00	253.896.500,00	41,67	45,53	214.126.598,00	29,84	24,73	62.797.586,00	35,76	38,24	276.924.184,00
45	Inspektorat	10.204.409.033,00	5.133.202.439,00	5.071.206.594,00	56,00	52,76	2.708.146.439,00	43,31	33,97	1.722.633.532,00	49,65	43,42	4.430.779.971,00
46	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	6.481.401.312,00	2.920.787.912,00	3.560.613.400,00	44,00	46,28	1.351.810.294,00	42,68	23,68	843.225.125,00	43,34	33,87	2.195.035.419,00

47	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	272.393.508.206,00	261.348.693.050,00	11.044.815.156,00	23,08	24,02	62.777.592.741,00	59,69	54,61	6.031.975.950,00	41,38	25,26	68.809.568.691,00
48	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	5.817.914.221,00	4.272.288.501,00	1.545.625.720,00	40,00	47,28	2.020.045.896,00	43,04	34,75	537.037.619,00	41,52	43,95	2.557.083.515,00
49	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan	6.989.070.406,00	2.618.938.546,00	4.370.131.860,00	25,00	27,97	732.460.930,00	22,43	10,90	476.427.930,00	23,71	17,30	1.208.888.860,00
	JUMLAH	1.343.218.316.497,00	792.817.247.066,00	550.401.069.431,00	126,05	32,75	259.657.161.067,00	39,54	23,73	130.611.572.969,00	82,79	29,05	390.268.734.036,00

BAB III. KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Indikator Makro Pembangunan Nasional

Berdasarkan arah kebijakan pembangunan nasional yang termuat dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2020, sebagaimana dituangkan pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2020, target pembangunan nasional yang dikemukakan dalam capaian indikator makro pembangunan adalah sebagai berikut :

a. Pertumbuhan ekononi secara nasional ditargetkan menjadi 5,3 persen
b. Tingkat kemiskinan sebesar 8,5 – 9,0 persen
c. Tingkat pengangguran pada akhir tahun 2018 ditargetkan agar dapat ditekan menjadi 4,8 – 5,0 persen
d. Laju inflasi nasional sebesar 3,5 persen.
e. Rasio Gini sebesar 0,375 0,380

Covid-19 telah menajdi pandemic global diawal tahun 20920. Ratusan negara telah terdampak, termasuk Indonesia dengan kasus terkonfirmasi positif pertama pada bulan Maret 2020 dan belum mengalami penurunan hingga Juli 2020 sehingga menjadi tersebar keseluruh provinsi di Indonesia. Berkaitan dengan hal ini, Bappenas mengeluarkan analisis dampak Covid, sebagai berikut :

a. Pertumbuhan ekonomi akan menurun di Kisaran -0,4 persen hingga 2,3 persen.
b. Tingkat pengangguran terbuka akan menjadi 7,8 – 8,5 persen
c. Tingkat Kemiskinan akan naik menjadi 9,7 persen – 10, 2 peren
d. Kunjungan wisatawan mancanegara akan turun sehingga berpotensi mengurangi pendapatan negara sebesar 3,6 – 4 Juta dollar.

Dalam kondisi dan situasi status tanggap darurat, pemerintah pusat telah mempertajam relokasi anggaran dan belanja pemerintah pusat serta belanja transfer di tahun 2020. Perubahan pada struktur perekonomian diantisipasi terjadi karena perubahan perilaku masyarakat, erubahan bentuk rantai pasok global, perubahan persepektif investor an sector prioritas, inovasi teknologi yang akan berkembang pesat serta percepatan transformasi investasi ke padat modal dan teknologi.

3.2. Kerangka Ekonomi Daerah Tahun 2020

Asumsi dasar yang mempengaruhi APBD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2020 adalah (i) kondisi ekonomi yang mengalami pertumbuhan yang berkelanjutan, (ii) penerimaan daerah tidak mengalami penurunan, (iii) PDRB perkapita penduduk tumbuh secara signifikan, (iv) iklim investasi semakin kondusif, dan (iv) pertumbuhan penduduk yang terkendali.

Asumsi non makro yang diduga akan berpengaruh terhadap APBD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2020 adalah adanya upaya peningkatan kinerja birokrasi di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Kuala dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dari berbagai aspek dan bidang pembangunan terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala khususnya pelayanan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar.

Tantangan eksternal yang dihadapi oleh perekonomian *domestic* pada tahun 2020 adalah belum stabilnya perekonomian dunia, termasuk negara-negara mitra dagang utama Indonesia seperti Tiongkok yangdiperkirakan akan kembali mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi. Kondisi tersebut yang disertai dengan penurunan hargakomoditas global terutama harga minyak mentah dunia berpotensi memberikan tekanan pada perekonomian Indonesia. Dalam meresponkondisi eksternal tersebut, Pemerintah bersama dengan Bank Indonesiatelah menempuh berbagai kebijakan untuk menjaga stabilitas perekonomian domestik terutama stabilitas nilai tukar dan pengendalian inflasi. Pemerintah juga telah mengambil langkah-langkah strategis dibidang fiskal terutama dalam menjaga kesinambungan fiskal dan upaya mendukung perbaikan defisit neraca berjalan.

Berdasarkanperkembangan terkini dari perekonomian global, domestik, dan berbagaikebijakan yang telah diambil Pemerintah, maka dipandang perlu untuk dilakukan penyesuaian terhadap beberapa asumsi dasar ekonomi makrodari APBD Kabupaten Barito Kuala tahun 2020. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Barito Kuala memandang perlu menegaskan kembali beberapa target atau

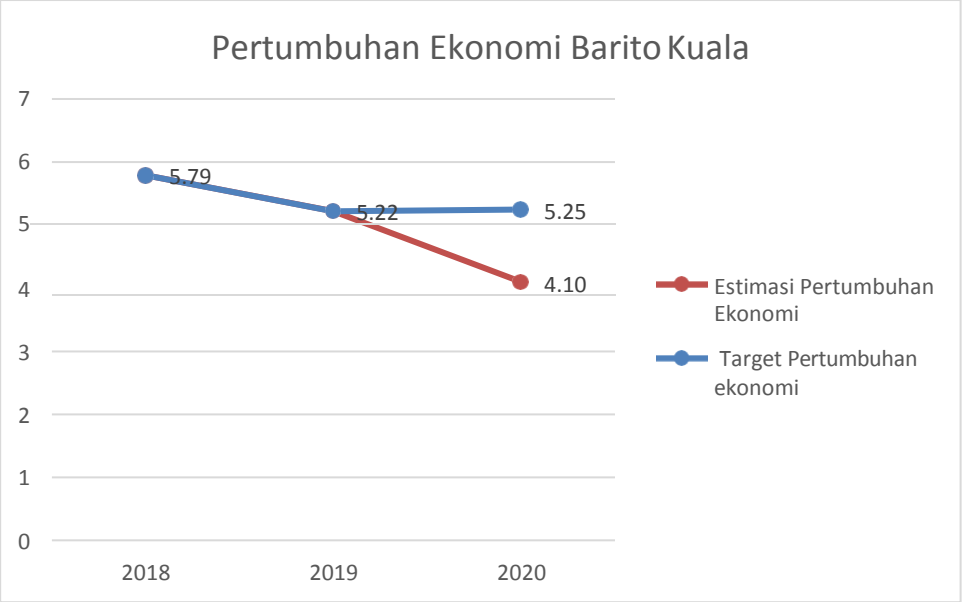
proyeksi capaian indikator makro pembangunan daerah dengan mengacu pada beberapa asumsi dasar ekonomi makro tahun 2020, sebagai berikut :

a. Perkembangan kondisi ekonomi daerah dapat dilihat dari indikator ekonomi makro serta perekonomian daerah. Perekonomian suatu daerah tidak dapat terlepas dengan perekonomian regional, perekonomian nasional bahkan perekonomian global. Ada faktor-faktor perekonomian yang tidak dapat dikendalikan oleh daerah seperti kebijakan pemerintah pusat menyangkut sektor moneter maupun sektor riil. Kemudian juga pengaruh perekonomian global seperti pengaruh naik turunnya harga minyak dunia, dan nilai tukar mata uang asing. Ditengah tekanan faktor eksternal, kinerja perekonomian Kabupaten Pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Barito Kuala ditargetkan akan mengalami pertumbuhan sebesar 5,25 persen. Empat sektor utama yang diharapkan menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi Barito Kuala adalah sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, kemudian sektor Industri Pengolahan terutama industri non migas, selanjutnya sektor Konstruksi dan yang terakhir adalah sektor Perdagangan. Sedangkan dua sektor sektor prioritas yang akan ditingaktkan perannya adalah sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dan sektor Real Estate. Kedua sektor ini diperkirakan akan mampu mendongkrak laju pertumbuhan ekonomi yang semakin stabil pada tahun 2020.
b. PDRB per-kapita merupakan gambaran kasar dari rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk selama satu tahun di suatu wilayah, dan dapat digunakan sebagai salah satu indikator tingkat kemakmuran. Dikatakan sebagai gambaran kasar, karena pada kenyataannya produk yang dihasilkan di suatu daerah belum tentu dinikmati oleh penduduk di daerah yang sama. PDRB per kapita penduduk Kabupaten Barito Kuala tahun 2020, masih berada pada angka proyeksi awal yakni sebesar 24,58 juta rupiah.
c. Indeks Harga Konsuman (IHK) yang dipakai oleh Badan Pusat Statistik Barito Kuala diwakili oleh angka IHK Kota Banjarmasin. Hal ini disebabkan karena Kabupaten Barito Kuala tidak termasuk dalam cakupan sampel kota IHK di Indonesia dan adanya asumsi bahwa distribusi harga di Kabupaten Barito Kuala cenderung sajma dengan kondisi di Kota Banjarmasin.

d. Tingkat pengangguran diproyeksikan dapat ditekan pada angka 1,05 persen. Target ini tentunya harus dibarengi dengan terus memacu capaian kinerja pada sektor ekonomi lainnya seperti peningkatan penyediaan lapangan kerja dan kesempatan berusaha yang semakin kondusif.

e. Sejalan dengan target pembangunan nasional dan pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan bahwa angka kemiskinan harus menjadi prioritas pembangunan di berbagai tingkatan baik nasional, provinsi maupun kabupaten/kota. Kabupaten Barito Kuala memproyeksikan tingkat kemiskinan tahun 2020 sebesar 5,25 persen.

a. Pertumbuhan Ekonomi



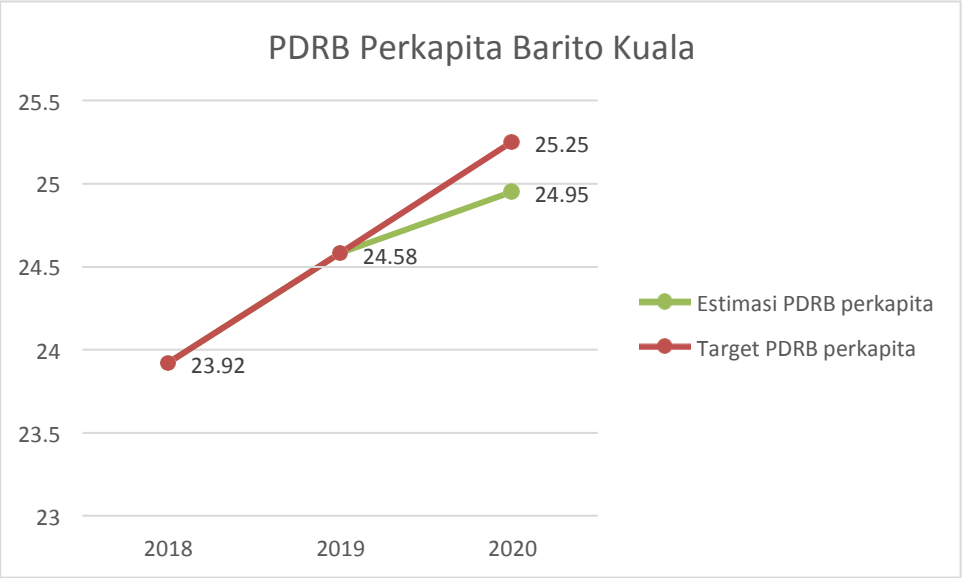
Pemerintah Kabupaten Barito Kuala masih optimis bahwa perekonomian Barito Kuala akan tetap tumbuh positif pada tahun 2020. Hasil evaluasi sementara terhadap perekonomian di Barito Kuala tahun 2020 bahwa dampak pandemi Covid-19 terbagi pada empat katagori yaitu :

1. Dampak langsung, akibat perubahan produktivitas (jam kerja) ada tiga sektor utama yang terdampak yaitu sektor konstruksi, perdagangan besar dan eceran, sektor jasa lainnya
2. Dampak jangka panjang akan berdampak pada sektor industri, sektor transportasi, sektor penyediaan akomodasi dan makan minum, sektor jasa keuangan, sektor jasa perusahaan. Dampak pada sektor ini mulai dirasakan mulai triwulan 2

3. Sektor yang tidak terdampak (tumbuh moderat) yaitu :
    - Sektor pertanian
    - Sektor pertambangan dan penggalian
    - Sektor pengadaan air
    - Sektor real estate
    - Sektor jasa pendidikan
4. Sektor yang akan meningkat ditengah pandemi diantaranya :
    - Sektor Pengadaan listrik
    - Sektor informasi dan komunikasi
    - Administrasi pemerintahan
    - Jasa kesehatan

Melihat hasil analisa ini maka target pertumbuhan ekonomi Barito Kuala tahun 2020 akan tumbuh positif pada 4,10 persen terkoreksi dari target tahun 2020 sebesar 5,25 persen sengan masih mengandalkan program prioritas yang sudah direncanakan diantaranya dengan tetap memperkuat sektor pertanian sebagai sektor andalan dan Barito Kuala lumbung pangan Kalimantan Selatan dan mendorong sektor lainnya seperti sektor kontruksi dan Sektor Industri pengolahan mulai berproduktivitas lagi. Diharapkan pemerintah Provinsi kalimantan Selatan akan dapat membantu daerah agar target yang direncanakan dapat dicapai sesuai.

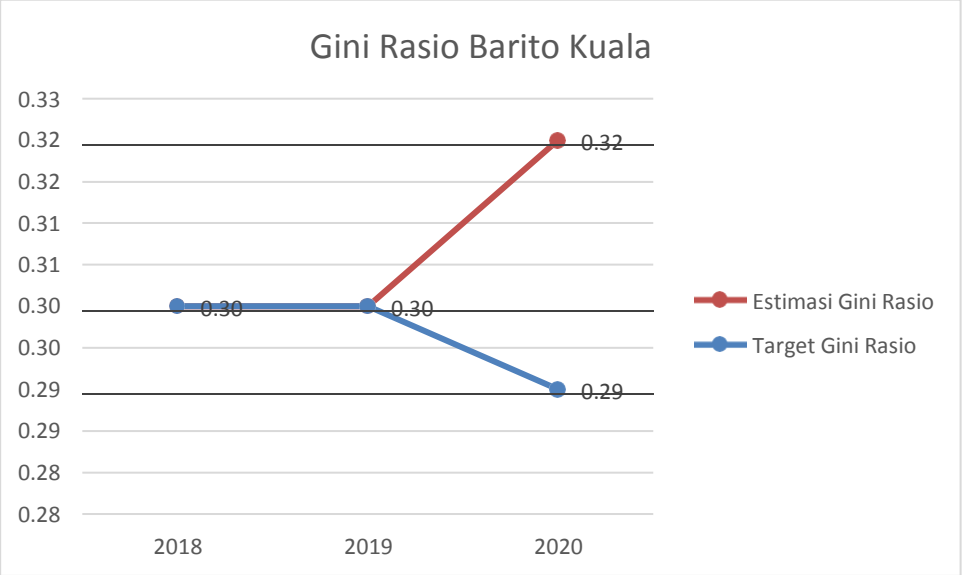
b. PDRB Per kapita



PDRB perkapita merupakan yang dipakai untuk mengukur tingkat pendapatan penduduk pada suatu wliayah, yang dihitung berdasarkan angka total PDRB dibagi

jumlah penduduk suatu wilayah. Pada tahun 2020 Barito Kuala menargetkan angka PDRB perkapitanya sebesar 25,25 juta perkapita namun adanya pandemi Covid-19 ini mau tidak mau berpengaruh pada tingkat pendapatan masyarakat. Semakin berkurangnya aktivitas ekonomi masyarakat terutama dari sektor riil akan mempengaruhi tingkat pendapatan masyarakat. Sehingga target tersebut harus terkoreksi menjadi 24,95 juta perkapita.

c. Indeks Gini



Indeks Gini Kabupaten Barito Kuala direvisi dan diperkirakan sama dengan target yang sudah disusun pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan pada angka 0,32. Kesenjangan pendapatan pada daerah yang berbasis agraris cenderung lebih kecil rentangnya jika dibandingkan pada daerah-daerah yang mengandalkan sumberdaya alam hasil tambang, maka Barito Kuala yang penduduknya sekitar 60 % nya adalah petani akan cenderung berpenghasilan yang hampir tingkat pendapatannya. Diharapkan tahun 2020 perekonomian dari sektor pertanian tetap meningkat akan berdampak meperkecil rentang pendapatan dari sektor lainnya, walaupun kegiatan dari sektor industri pengolahan meningkat, namun meningkatnya sektor pengolahan ini diharapkan lebih dominan dari usaha UMKM (usaha mikro kecil menengah). Pandemi Covid-19 yang dialami pada tahun 2020 kemungkinan akan meningkatkan kemiskinan yang berdampak pada kesenjangan pendapatan masyarakat pada masing-masing golongan mempengaruhi angka gini rasio salah satu yang sangat berdampak pada kegiatan ekonomi masyarakat adalah kegiatan UMKM. Stimulus yang diberikan pemerintah

seperti relaksasi utang, bantuan permodalan dengan bunga sangat ringan diharapkan mampu bergeliat kembali kegiatan UMKM.

3.3. Struktur Anggaran

Perbandingan Struktur Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2020 dengan Perubahan APBD 2020 beserta Pendapatan, Rincian Belanja, Rincian Pembiayaan dapat di lihat pada table di halaman berikut.

Tabel 3. Asumsi Struktur Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan 2020

KODE	URAIAN	APBD 2020	RAPBDP 2020	+ / (-)	%
1	**PENDAPATAN**	1,351,186,469,437.00	1,250,200,763,844.32	(100,985,705,592.68)	(7.47)
2	**BELANJA**	1,365,336,469,437.00	1,257,936,640,129.00	(107,399,829,308.00)	(7.87)
	Surplus / (Defisit)	(14,150,000,000.00)	(7,735,876,284.68)	6,414,123,715.32	(45.33)
3	**PEMBIAYAAN DAERAH**				
3 . 1	Penerimaan Pembiayaan Daerah	35,150,000,000.00	139,832,527,595.56	104,682,527,595.56	297.82
3 . 2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	21,000,000,000.00	21,000,000,000.00	-	-
	PEMBIAYAAN NETTO	14,150,000,000.00	118,832,527,595.56	104,682,527,595.56	739.81
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0.00	111,096,651,310.88	111,096,651,310.88	

Tabel 4. Rincian Pendapatan pada Perubahan APBD 2020

KODE	URAIAN	APBD 2020	RAPBDP 2020	+ / (-)	%
1	**PENDAPATAN**	**1,351,186,469,437.00**	**1,250,200,763,844.32**	**(100,985,705,592.68)**	**7.47)**
1 . 1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	**71,807,241,437.00**	**60,577,580,739.32**	**(11,229,660,697.68)**	**(15.64)**
1 . 1 . 1	Pendapatan Pajak Daerah	24,394,483,000.00	15,513,095,906.00	(8,881,387,094.00)	36.41)
1 . 1 . 2	Hasil Retribusi Daerah	4,596,148,109.00	3,813,752,515.00	(782,395,594.00)	(17.02)
1 . 1 . 3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8,630,760,000.00	6,132,938,662.00	(2,497,821,338.00)	(28.94)
1 . 1 . 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	34,185,850,328.00	35,117,793,656.32	931,943,328.32	2.73
1 . 2	**DANA PERIMBANGAN**	**974,905,489,000.00**	**895,096,307,105.00**	**(79,809,181,895.00)**	**(8.19)**
1 . 2 . 1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	128,979,793,000.00	151,483,508,105.00	22,503,715,105.00	17.45
1 . 2 . 2	Dana Alokasi Umum	601,975,382,000.00	536,423,276,000.00	(65,552,106,000.00)	(10.89)
1 . 2 . 3	Dana Alokasi Khusus	243,950,314,000.00	207,189,523,000.00	(36,760,791,000.00)	(15.07)
KODE	URAIAN	APBD 2020	RAPBDP 2020	+ / (-)	%
1 . 3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	304,473,739,000.00	294,526,876,000.00	(9,946,863,000.00)	(3.27)
1 . 3 . 1	Pendapatan Hibah	41,601,445,000.00	37,672,789,205.00	(3,928,655,795.00)	(9.44)
1 . 3 . 3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	70,000,000,000.00	69,372,655,795.00	(627,344,205.00)	(0.90)
1 . 3 . 4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	37,344,660,000.00	34,061,162,000.00	(3,283,498,000.00)	(8.79)
1 . 3 . 6	Pendapatan Lainnya	155,527,634,000.00	153,420,269,000.00	(2,107,365,000.00)	(1.35)

Tabel 5. Rincian Belanja pada Perubahan APBD 2020

KODE	URAIAN	APBD 2020	RAPBDP 2020	+ / (-)	%
2	**BELANJA**	**1,365,336,469,437.00**	**1,257,936,640,129.00**	**(107,399,829,308.00)**	**(7.87)**
2 . 1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	**792,817,247,066.00**	**881,665,949,437.55**	**88,848,702,371.55**	**11.21**
2 . 1 . 1	Belanja Pegawai	546,450,037,245.00	542,878,105,716.55	(3,571,931,528.45)	(0.65)
2 . 1 . 4	Belanja Hibah	12,617,382,390.00	12,387,482,390.00	(229,900,000.00)	(0.02)
2 . 1 . 5	Belanja Bantuan Sosial	1,933,475,000.00	1,933,475,000.00	-	-
2 . 1 . 6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	2,902,924,045.00	2,902,924,045.00	-	-
2 . 1 . 7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintahan Desa	227,661,732,800.00	220,312,266,700.00	(7,349,466,100.00)	(3.23)
2 . 1 . 8	Belanja Tidak Terduga	1,251,695,586.00	101,251,695,586.00	100,000,000,000.00	7,989.16
2 . 2	**BELANJA LANGSUNG**	**572,519,222,371.00**	**376,270,690,691.45**	**(196,248,531,679.55)**	**(34.28)**
2 . 2 . 1	Belanja Pegawai	16,896,591,748.00	14,096,788,248.00	(2,799,803,500.00)	(16.57)
2 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	306,673,172,765.00	217,125,270,679.45	(89,547,902,085.55)	(29.20)
2 . 2 . 3	Belanja Modal	248,949,457,858.00	145,048,631,764.00	(103,900,826,094.00)	(41.74)
	SURPLUS / (DEFISIT)	**(14,150,000,000.00)**	**(7,735,876,284.68)**	**6,414,123,715.32**	**(45.33)**

Tabel 6. Pembiayaan pada Perubahan APBD 2020

KODE	URAIAN	APBD 2020	RAPBDP 2020	+ / (-)	%
3	**PEMBIAYAAN DAERAH**				
3 . 1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH**	**35,150,000,000.00**	**139,832,527,595.56**	**104,682,527,595.56**	**297.82**
3 . 1 . 1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	25,150,000,000.00	129,832,527,595.56	104,682,527,595.56	416.23
3 . 1 . 5	Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	-	-
3 . 2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH**	**21,000,000,000.00**	**21,000,000,000.00**	**-**	**-**
3 . 2 . 2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	11,000,000,000.00	11,000,000,000.00	-	-
3 . 2 . 4	Pemberian Pinjaman Daerah	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	-	-
	PEMBIAYAAN NETTO	**14,150,000,000.00**	**118,832,527,595.56**	**104,682,527,595.56**	**739.81**
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	**0.00**	**111,096,651,310.88**	**111,096,651,310.88**	
	TOTAL APBD	**1,386,336,469,437.00**	**1,390,033,291,439.88**	**3,696,822,002.88**	

IV. SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Rumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2021, mengacu kepada : (1) Permasalahan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Kuala Tahun 2013-2017 (2) Hasil evaluasi kinerja RKPD Tahun 2019; (3) Prioritas nasional dalam rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021; (4) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 khususnya sembilan prioritas pembangunan (Nawacita), dan (5) Pokok pikiran DPRD Kabupaten Barito Kuala. Selain memperhatikan kelima aspek tersebut, rumusan prioritas pembangunan Kabupaten Barito Kuala tahun 2021 juga berpedoman kepada kebijakan pengembangan wilayah yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Barito Kuala tahun 2012-2031 khususnya pengembangan wilayah dan sektor unggulan di setiap kecamatan.

Penyusunan prioritas dan sasaran pembangunan diarahkan untuk menjamin terwujudnya visi misi Pemerintah Kabupaten Barito Kuala sebagaimana tertuang dalam pembangunan nasional yang tercantum dalam RKP 2021 dan Prioritas pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan dalam RKPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021.

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2019-2024

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 sehingga menjadi sangat penting. RPJMN 2020-2024 akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN, dimana pendapatan perkapita Indonesia akan mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan negara-negara berpenghasilanmenengah atas (*upper-middle income country/MIC*) yang memiliki kondisi infrastruktur, kualitas sumberdaya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik.

Terdapat 4 (empat) pilar dari RPJMN ke IV tahun 2020-2024 yang merupakan amanat RPJPN 2005-2025 untuk mencapai tujuan utama dari rencana pembangunan nasional periode terakhir. Keempat pilar tersebut diterjemahkan ke dalam 7 agenda pembangunan yang didalamnya terdapat Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas. Keempat Pilar Tersebut adalah sebagai berikut.

1. Kelembagaan politik dan hukum yang mantap
2. Kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat
3. Struktur ekonomi yang semakin maju dan kokoh
4. Terwujudnya keanekaragaman hayati yang terjaga

Selanjutnya, 7 agenda pembangunan dari RPJMN ke IV tahun 2020-2024 adalah :

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
4. Membangun Kebudayaan dan Karakter Bangsa
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Selanjutnya, ketujuh agenda pembangunan ini di jabarkan lagi kedalam program-progam yang di rangkum dalam infografis pada halaman berikut ini.



Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas

Peningkatan inovasi dan kualitas Investasi merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata.

Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui:

1) Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kelautan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan; dan
2) Akselerasi peningkatan nilai tambah *agro-fishery industry*, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital



Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan & Menjamin Pemerataan

Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan memperhatikan harmonisasi antara rencana pembangunan dengan pemanfaatan ruang.

Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan kesinambungan dan keberlanjutan ini dapat dilakukan melalui:

1) Pengembangan sektor/ komoditas/kegiatan unggulan daerah,
2) Distribusi pusat-pusat pertumbuhan (PKW) ke wilayah belum berkembang,
3) Peningkatan daya saing wilayah yang inklusif,
4) Memperkuat kemampuan SDM dan Iptek berbasis kewilayahan dalam mendukung ekonomi unggulan daerah, serta
5) Meningkatkan IPM melalui pemenuhan pelayanan dasar secara merata.



Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing

Manusia merupakan modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah.

Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan daya saing SDM yaitu sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter, melalui:

1) Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan;
2) Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial;
3) Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta;
4) Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;
5) Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda;
6) Pengentasan kemiskinan; dan
7) Peningkatan produktivitas dan daya saing.



Membangun Kebudayaan dan Karakter Bangsa

Pembangunan kebudayaan dan karakter bangsa memiliki kedudukan sentral dalam kerangka pembangunan nasional untuk mewujudkan negara-bangsa yang maju, modern, unggul, berdaya saing dan mampu berkompetisi dengan bangsa-bangsa lain.

Mentalitas disiplin, etos kemajuan, etika kerja, jujur, taat hukum dan aturan, tekun, dan gigih adalah karakter dan sikap mental yang membentuk nilai-nilai budaya di dalam masyarakat. Pembangunan karakter dilaksanakan secara holistik dan integratif dengan melibatkan segenap komponen bangsa melalui:

1) Memperkukuh ketahanan budaya bangsa,
2) Memajukan kebudayaan,
3) Meningkatkan pemahaman, pengamalan, dan penghayatan nilai agama,
4) Meningkatkan kualitas dan ketahanan keluarga
5) Meningkatkan budaya literasi



Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar

Perkuatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional.

Pemerintah Indonesia akan memastikan pembangunan infrastruktur akan didasarkan kebutuhan dan keunggulan wilayah melalui:

1) Menjadikan keunggulan wilayah sebagai acuan untuk mengetahui kebutuhan infrastruktur wilayah,
2) Peningkatan pengaturan, pembinaan dan pengawasan dalam pembangunan,
3) Pengembangan infrastruktur perkotaan berbasis TIK,
4) Rehabilitasi sarana dan prasarana yang sudah tidak efisien,
5) Mempermudah perijinan pembangunan infrastruktur.



Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim

Pembangunan nasional perlu memperhatikan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana, dan perubahan iklim.

Pembangunan lingkungan hidup, serta peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim akan diarahkan melalui kebijakan:

1) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup;
2) Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim; serta
3) Pembangunan Rendah Karbon.

Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Negara wajib terus hadir dalam melindungi segenap bangsa, memberikan rasa aman serta pelayanan publik yang berkualitas pada seluruh warga negara dan menegakkan kedaulatan negara.

Pemerintah akan terus berupaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan yang dapat diakses oleh semua masyarakat melalui:

1) Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas,
2) Meningkatkan Hak Hak Politik Dan Kebebasan Sipil,
3) Memperbaiki sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber,
4) Mempermudah akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi.
5) Mempermudah akses terhadap pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri



Sasaran, Target dan Indikator RPJMN 2020 – 2024 di jabarkan dalam tabel dan infografis berikut ini :

Tabel 4.1. Agenda 1, Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas

No	Sasaran	Indikator	Target 2020	Target 2024
A. Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangungan ekonomi yang berkelanjutan				
1	Pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan energi baru terbarukan (EBT)	1. Porsi EBT dalam bauran energi nasional (7.2.1*)	13,4%	20%
		2. Penyediaan energi nasional	287,2 MTOE	375,9 MTOE
		3. Kapasitas terpasang pembangkit EBT	14,5 GW	37,3 GW
		4. Produksi biodiesel	7,7 juta kilo liter	10,8 juta kilo liter
		5. Produksi bioetanol	0,8 juta kilo liter	2,7 juta kilo liter
		6. Intensitas energi primer (7.3.1*)	421 SBM/Rp. Milliar	404 SBM/Rp. Miliar
		7. Intensitas energi final	225 SBM/Rp. Milliar	213 SBM/Rp. Miliar
		8. *Domestic Market Obligation* (DMO) Batubara	44,9%	50,8%
		9. *Domestic Market Obligation* (DMO) Gas untuk industri	27%	31%
		10. TKDN Sektor pembangkit EBT	30%	40%
2	Peningkatan kuantitas/ ketersediaan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi	1. Produktivitas air (*water productivity*)	US$4/$m^3$	US$5,4/$m^3$
		2. Luas tutupan hutan dengan indeks jasa ekosistem tinggi**	65 juta ha	65 juta ha
		3. Pemenuhan air untuk irigasi	0,90 kg/m^3	1,12 kg/m^3
		4. Pemenuhan air untuk domestik dan kawasan industri	20 m3/detik	90 m3/detik
		5. Pemenuhan air untuk energi (PLTA/M/ MH)	5.774 MW	8.304 MW
		6. Koefisien limpasan	0,5-0,6	0,4
		7. Kapasitas tampungan air**	57,33 m^3/ kapita	63,93 m^3/ kapita
3	Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan	1. Skor Pola Pangan Harapan (2.2.2(c))	93,3	96,3
		2. Angka Kecukupan Energi (AKE) (2.1.2(a))	2.100 kkal/hari	2.100 kkal/hari
		3. Angka Kecukupan Protein (AKP)	57 gram/ kapita/hari	57 gram/ kapita/hari
		4. Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (*Prevalence of Undernourishment*/PoU)	6,40	5,38

No	Sasaran	Indikator	Target 2020	Target 2024
		5. Prevalensi Penduduk dengan Kerawanan Pangan Sedang atau Berat (*Food Insecurity Experience Scale*/FIES)	5,21	4,05
		6. Konsumsi ikan (2.2.2(c))	58,3 kg/kapita/ tahun	60,9 kg/kapita/ tahun
		7. Konsumsi daging	7,1 kg/kapita/ tahun	9,7 kg/kapita/ tahun
		8. Konsumsi sayur dan buah	260,2 gram/kapita/ tahun	316,3 gram/kapita/ tahun
		9. Jumlah fortifikasi dan biofortifikasi	1 varietas unggul baru	1 varietas unggul baru
		10. Produksi beras (gabah kering giling)	59,63 juta ton	67,12 juta ton
		11. Nilai tambah per tenaga kerja pertanian (2.3.1*)	Rp 36,19 juta/ tenaga kerja	Rp 45,44 juta/ tenaga kerja
		12. Jumlah varietas unggul tanaman dan hewan untuk pangan yang dilepas (2.5.1*)	30 varietas unggul tanaman baru dan 10 galur hewan ternak	30 varietas unggul tanaman baru dan 10 galur hewan ternak
		13. Tingkat adopsi teknologi pertanian oleh petani	80%	95%
		14. Sumber daya genetika tanaman dan hewan sumber pangan yang terlindungi/tersedia (2.5.2*)	3.100 aksesi	3.100 aksesi
		15. *Global food security index*	56,9	64,1
4	Peningkatan pengelolaan kemaritiman dan kelautan	1. Konservasi kawasan kelautan (14.5.1*)	22,0 juta ha	24,5 juta ha
		2. Pengelola WPP (14.2.1(b))	11 unit	11 unit
		3. Integrasi Rencana Tata Ruang (RTRW) dan Rencana Zonasi (RZ) serta penyelesaian perencanaan tata ruang laut dan zonasi pesisir	0 RTRW RZ	10 RTRW RZ
		4. Pemetaan bathimetri prioritas skala 1:50.000	63%	100%
		5. Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman (14.4.1*)	64%	80%
		6. Produksi ikan	15,5 juta ton	19,6 juta ton
		7. Produksi rumput laut	15,8 juta ton	20,0 juta ton
		8. Produksi garam	3,0 jutan ton	3,8 juta ton
		9. Jumlah provinsi dengan peningkatan akses pendanaan usaha nelayan (14.b.1(a))	34 provinsi	34 rovinsi
		10. Jumlah hasil riset yang diadopsi/ diterapkan	5 hasil riset	10 hasil riset
B. Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, ekspor, dan daya saing perekonomian				

No	Sasaran	Indikator	Target 2020	Target 2024
5	Penguatan kewirausahaan dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)	1. Rasio kewirausahaan nasional	3,55-3,80	3,75-4,15%
		2. Indeks motivasi berusaha	11,48	12,55
		3. Pertumbuhan wirausaha baru	3%	5%
		4. Presentase UMKM yang melakukan kemitraan	7%	10%
		5. Rasio kredit UMKM terhadap total kredit perbankan (8.10.1(b))	19,75%	22%
		6. Proporsi IKM dengan pinjaman/kredit (9.3.2*)	2,35%	5%
		7. Pertumbuhan volume usaha koperasi	20%	25%
		8. Jumlah sentra industri kecil dan menengah (IKM) diluarJawa yang beroperasi	10 Sentra	50 Sentra (kumulatif 2020-2024
		9. Proporsi nilai tambah IKM terhadap total nilai tambah industri (9.3.1*)	18,5%	20%
		10. Kontribusi usaha sosial	1,90% PDB	2,50 % PDB
6	Peningkatan nilai tambah dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi	1. Pertumbuhan PDB pertanian	3,77-3,79%	3,90-4,03%
		2. Kontribusi PDB kemaritiman	6,50%	7,80-9,00%
		3. Pertumbuhan PDB industri (9.2.1(a))	5,00-5,40%	5,93-8,35%
		4. Kontribusi PDB industri (9.2.1*)	19,82-19,85%	20,06-21,28%
		5. Pertumbuhan PDB industri non migas	5,58-6,00%	6,11-8,36%
		6. Pertumbuhan PDB subsektor industri makanan dan minuman	8,09-8,22%	8,57-8,79%
		7. Kontribusi PDB pariwisata (8.9.1*)	4,8%	5,5%
		8. Destinasi pariwisata prioritas	10 destinasi	10 destinasi
		9. Revitalisasi destinasi	0 destinasi	1 destinasi
		10. Destinasi wisata alam berkelanjutan berbasiskan taman nasional	12 klaster	12 klaster
		11. Destinasi wisata bahari	8 destinasi	8 destinasi
		12. Nilai tambah ekonomi kreatif	Rp.1.305-Rp.1.307 triiun	Rp.1.840-1.890 triliun
		13. Pertumbuhan PDB informasi dan telekomunikasi	7,26-7,54%	7,54– 8,78%
		14. Pertumbuhan investasi (PMTB)	7,0-7,3%	6,95– 8,94%
		15. Peringkat kemudahan berusaha di Indonesia (ranking EoDB)	Menuju 40	Menuju 35
		16. Realisasi PMA dan PMDN	Rp.872,6-Rp.878,5 triliun	Rp.1.353,5-Rp.1.506,4 triliun
		17. Kontribusi PMDN terhadap total realisasi PMA dan PMDN	46,2-46,3%	49,1-49,6%

No	Sasaran	Indikator	Target 2020	Target 2024
		18. Kontribusi realisasi PMA dan PMDN sektor manufaktur	37,3%	56,7– 61,0%
		19. Capex BUMN	Rp.528,4-565,1 trilliun	Rp.744,7-814,0 triliun
		20. Jumlah Kawasan Industri (KI) yang difasiliasi di luar Jawa	5 KI dan 8 KEK Industri	16 KI dan 8 KEK Industri
		21. Jumlah kawasan industri halal	2 Kawasan	3 Kawasan
		22. Jumlah Daerah Tertib Ukur (DTU)	10 DTU	10 DTU
7	Peningkatan produktivitas tenaga kerja dan penciptaan lapangan kerja	1. Penyediaan lapangan kerja per tahun	2,7-3,0 juta orang	2,7-3,0 juta orang
		2. Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja (8.2.1*)	4,5-5,5%	5,0-7,0%
		3. Kontribusi tenaga kerja industri (9.2.2*)	14,2%	15,7%
		4. Jumlah tenaga kerja industri	19,7 juta orang	22 juta orang
		5. Jumlah tenaga kerja pariwisata (8.9.2*)	13 juta orang	15 juta orang
		6. Jumlah tenaga kerja ekonomi kreatif	19 juta orang	21 juta orang
		7. Proporsi pekerja berkeahlian menengah dan tinggi	43%	50%
		8. Proporsi angkatan kerja berpendidikan menengah ke atas	45%	52,1%
		9. Jumlah lulusan pendidikan vokasi	1,82 juta orang	2,16 juta orang
		10. Jumlah lulusan pelatihan vokasi	2 juta orang	3,8 juta orang
		11. Jumlah lulusan pendidikan dan pelatihan vokasi berserfitikat kompetensi	2 juta orang	2,8 juta orang
		12. Jumlah penerima manfaat skema pendanaan pengembangan keahlian	2 juta orang	3,8 juta orang
9	Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi	1. Kontribusi sektor jasa keuangan/PDB	4,18-4,21%	4,25-4,40%
		2. Rasio M2/PDB	40,5-40,59%	40,85-42,05%
		3. Jumlah ATM per 100.000 penduduk(8.10.1*)	55,84 unit	57,51 unit
		4. Kontribusi ekonomi digital	3,17%	4,66%
		5. Skema pembiayaan berbasis HKI	0 skema	1 skema
		6. Biaya logistik terhadap PDB	23,2%	19%
		7. Skor *logistic performance index*	3,2	3,5
		8. Tingkat Inflasi	3 ± 1 Persen	3 ± 1 Persen
		9. Nilai transaksi *e-commerce*	Rp. 260 triliun	Rp. 600 trilun
		10. Jumlah pelaku kreatif yang difasilitasi infrastruktur TIK	15.000 orang	15.000 orang

No	Sasaran	Indikator	Target 2020	Target 2024
		11. Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001 (12.6.1(a))	1.845 perusahaan	5.000 perusahaan
		12. Jumlah lokasi penerapan sustainable tourism development (12.b.1)	12 lokasi	22 lokasi
		13. Peringkat *Travel and Tourism Competitiveness Index*	40***	29-34
		14. Rasio pajak (17.1.1(a))	10,9-11,3%	12,7-14,2%
		15. Pembentukan badan penerimaan pajak	0 unit	1 unit
		16. Pembaharuan sistem inti administrasi perpajakan (*core tax administration system*)	13,8%	Selesai
		17. Ketersediaan data statistik ekonomi kreatif	2 database	2 database
		18. Ketersediaan data statistik pariwisata	3 database	3 database
		19. Ketersediaan data statistik *e-commerce*	1 database	1 database
		20. Perbaikan data produksi pangan (beras, jagung, kedelai)	2 database	3 database

Keterangan:
Beberapa sasaran belum memiliki target karena masih dalam tahap perhitungan
* Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global untuk Sustainable Development Goals (SDGs)
** Indikator nasional sebagai indicator tambahan atau proksi dari indikator global untuk SDGs yang masih dikembangkan
*** Indeks TTCI diukur setiap tahun ganjil, sehingga target tahun 2020 merupakan target tahun 2019
Angka dalam kurung pada indikator menunjukkan indikator SDGs

Agenda 2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan

A. Sasaran pembangunan berbasis kewilayahan secara umum yaitu:

1. Meningkatnya pemerataan antar wilayah (antara KBI – KTI dan Jawa dan Luar Jawa);
2. Meningkatnya keunggulan kompetitif pusat-pusat pertumbuhan wilayah;
3. Meningkatnya kualitas dan akses pelayanan dasar, daya saing serta kemandirian daerah; dan
4. Meningkatnya sinergi pemanfaatan ruang dan wilayah

Tabel 4.2. Target pembangunan kewilayahan berbasis pulau dan tingkat kemiskinannya*

Wilayah	Target Pertumbuhan	Target tingkat kemiskinan
Sumatera	4,62 - 5,55 %	7,99 - 5,76%
Jawa-Bali	5,74 - 6,27 %	7,73 - 5,93%
Nusa Tenggara	3,12 - 5,13 %	16,85 - 13,69%
kalimantan	4,08 - 5,27 %	4,06 - 3,29 %
Sulawesi	6,68 - 7,34 %	9,65 - 7,90 %
Maluku	6,88 - 7,47 %	11,49 - 9,40 %
Papua	7,18 - 7,75 %	23,28 - 19,02%
* Angka sementara per Januari 2019		

Target pembangunan kewilayahan berbasis pulau tersebut akan dicapai melalui 6 kegiatan prioritas kewilayahan

B. Indikator dan target kegiatan prioritas

No	Indikator Kewilayahan	Baseline 2019	Target RPJMN 2020- 2024
A. KP Pengembangan Kawasan Strategis			
1	Rasio laju pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/ KSPN) terhadap laju pertumbuhan ekonomi wilayah (per pulau/provinsi)	N/A	>1
2	Peta dasar skala besar 1:5.000 secara nasional (% cakupan wilayah)	2%	100%
3	Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional (KSN)	10 Rancangan Perpres	5 Rancangan Perpres
4	RDTR Perbatasan Negara	10 Matek RDTR KPN	25 Rancangan Perpres
5	Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimbingan teknis penyusunan RDTN (fokus di koridor dan pusat-pusat pertumbuhan	36 Kab/Kota	150 Kab/Kota
6	Sertifikasi Hak Atas Tanah (sertifikat HAT, sertifikat redistribusi tanah dan sertifikat konsolidasi tanah)	7.437.087 bidang	58.550.000 bidang
7	Pembentukan dan operasionalisasi Bank Tanah	0	1
B. KP Pengembangan Kawasan Perkotaan			
1	Perencanaan wilayah metropolitan di luar Jawa	2 wilayah metropolitan	3 wilayah metropolitan
2	Pembangunan wilayah metropolitan di luar Jawa	-	4 wilayah metropolitan
3	Pemindahan Ibukota Negara	1	1

No	Indikator Kewilayahan	Baseline 2019	Target RPJMN 2020- 2024
4	Pengembangan Kota Besar, Sedang, Kecil sebagai PKN/PKW (kota)		54 kota
5	Pembangunan kota baru	-	4 kota baru
C. KP Pemenuhan Pelayanan Dasar			
1	Proporsi rumah tangga yang menempati hunian layak	40,05% (2019)	52,78% (2024)
D. KP Pembangunan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, dan Pedesaan			
1	Penurunan jumlah desa tertinggal menjadi desa berkembang (desa)	6.518*	7.000
2	Peningkatan jumlah desa berkembang menjadi desa mandiri (desa)	2.665*	3.000
3	Penetapan batas administrasi desa/kelurahan	N/A	100%
4	Peningkatan kesejahteraan dan tata kelola di kecamatan lokasi prioritas perbatasan negara (lokasi)	187	187
5	Pengembangan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) termasuk ekonomi kawasan sekitarnya (lokasi)	10	18
6	Jumlah daerah tertinggal (kabupaten)	63 (indikasi awal)	35
7	Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal (persentase)	24,5%**	22,5 - 23%
8	Rata-rata IPM di daerah tertinggal	58,9**	62 – 62,5
9	Pengembangan Kawasan Perdesaan sebagai Kawasan Strategis Kabupaten	60	150
10	Pengembangan kawasan transmigrasi (kawasan)	144	63
E. KP Kelembagaan dan Keuangan Daerah			
1	Jumlah daerah yang pendapatan pajak daerah dan retribusi daerahnya meningkat minimal 5 persen dari tahun anggaran	300	542
2	Jumlah daerah yang belanja APBD nya berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM bidang pelayanan dasar	248	542
3	Persentase jumlah daerah yang memiliki indeks inovasi tinggi	20%	50%
4	Jumlah daerah yang melakukan harmonisasi dan perbaikan Perda DPRD dalam rangka memberikan kemudahan investasi	102	542
5	Jumlah daerah yang menerapkan penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban berbasis elektronik melalui aplikasi e-budgeting dan e-budgeting plus	102	542
6	Jumlah realisasi kesepakatan kerjasama daerah	10***	44****
7	Persentase capaian penerapan SPM di daerah	N/A*****	100%

* capaian kumulatif tahun 2015-2018
** estimasi capaian tahun 2019

*** di 10 provinsi
**** di 34 provinsi
*****keterangan: data capaian SPM berdasarkan PP No. 2/2018 belum tersedia, adapun data yang tersedia adalah capaian SPM berdasarkan PP No. 65/2005 yaitu sebesar 52%

Agenda 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing

- **Sasaran, Target, dan Indikator**

Tabel 4.3. Sasaran/Indikator/Target Pembangunan Manusia

No	Indikator	Baseline	Target 2024
Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan			
1	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/ TFR)	2,28 (SUPAS, 2015)	2,10
2	Cakupan NIK	96	100
	Kepemilikan akte kelahiran	83,3	100
	Pencatatan akte kematian	N.A	100
	Kepemilikan buku nikah	N.A	100
	Pencatatan perceraian	N.A	100
	Penyebab kematian	Belum Diterapkan	100
3	Persentase daerah yang menyelenggarakan layanan terpadu penanggulangan kemiskinan	25%	80%
4	Jumlah kab/kota yang memanfaatkan sistem perencanaan, penganggaran dan monev unit	86 kab/kota	300 kab/kota

No	Indikator	Baseline	Target 2024
	terpadu dalam proses penyusunan program-program penanggulangan kemiskinan		
Perlindungan sosial bagi seluruh penduduk			
1	Persentase penduduk yang tercakup dalam program perlindungan sosial:		
	a. Proporsi penduduk yang tercakup dalam program jaminan sosial (%)	78,7%	98%
	b. Proporsi rumah tangga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan sosial pemerintah (%)	65,2 %	80%
2	Cakupan penerima bantuan non-tunai dan subsidi tepat sasaran: a. Bantuan keluarga untuk kesehatan dan pendidikan b. Bantuan Pangan c. Bantuan elpiji 3 kg d. Bantuan listrik daya 450 VA dan 900 VA	10 juta KK 15,6 juta KK 25,7 juta RT 25,7 juta RT	10 juta KK 15,6 juta KK 25,7 juta KK 25,7 juta KK
3	Cakupan penerima bantuan iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional dari 40 persen penduduk berpendapatan terbawah	96,6 juta penduduk (1 Februari 2019)	112,9 juta penduduk
4	Mobilitas penduduk lanjut usia (%)	92,1% (Supas, 2015)	94%
5	Kapasitas penduduk lansia (%)	88,6 % (Supas, 2015)	90%
6	Pembangunan kawasan ramah lansia (kabupaten/kota/komunitas)	N/A	Meningkat
7	Persentase rumah tangga dengan lanjut usia yang memperoleh bantuan social	18,9% (BPS, 2018)	25%
8	Cakupan kepesertaan JKN	81,7% (1 Maret 2019)	98%
9	Cakupan kepesertaan BPJS TK a. Pekerja formal 40% b. Pekerja informal 5%	40% 5%	> 70% > 30%
10	Cakupan penerima bantuan iuran (PBI) Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	N/A	20 juta pekerja
11	Tersusunnya Sistem Perlindungan Sosial Adaptif Berbasis Asuransi	0	1
12	Kawasan ramah lansia (kabupaten/kota/komunitas)	N/A	Meningkat
13	Persentase rumah tangga dengan lanjut usia yang memperoleh bantuan sosial	18,9 % (BPS, 2018)	25%
14	Persentase anak penyandang disabilitas usia sekolah yang memiliki akses terhadap layanan pendidikan dasar	37,5% (Susenas, 2018)	50%
15	Persentase pemerintah daerah yang menerapkan prinsip-prinsip kota inklusif	2,7% (Apeksi, 2017)	7,5%
Pemenuhan layanan dasar			
1	Angka kematian ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	305 (SUPAS, 2015)	183

No	Indikator	Baseline	Target 2024
2	Angka kematian bayi (per 1.000 kelahiran hidup)	24 (SDKI, 2017)	16
3	Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi Cara Modern (mCPR)	57,2 (SDKI, 2017)	63,41
4	Unmet Need KB (persen)	10,60% (SDKI, 2017)	7,4%
5	ASFR 15 – 19 Tahun	36 (SDKI, 2017)	18
6	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (persen)	30,8% (Riskesdas, 2018)	19%
7	Prevalensi wasting (kurus dan sangat kurus) pada balita (persen)	10,2% (Riskesdas, 2018)	7%
8	Insidensi HIV (per 1.000 penduduk yang tidak terinfeksi HIV)	0,24 (Kemkes, 2018)	0,18
9	Insidensi TB (per 100.000 penduduk)	319 (Global TB Report, 2017)	190
10	Eliminasi malaria (kab/kota)	285 (Kemkes, 2018)	405
11	Persentase merokok penduduk usia 10 - 18 tahun	9,1% (Riskesdas, 2018)	8,7%
12	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥ 18 tahun (persen)	21,8% (Riskesdas, 2018)	21,8%
13	Persentase imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12-23 bulan	57,9% (Riskesdas, 2018)	80%
14	Persentase fasilitas kesehatan tingkat pertama terakreditasi	40% (Kemkes, 2018)	85%
15	Persentase rumah sakit terakreditasi	63% (Kemkes, 2018)	95%
16	Persentase puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar	23% (Kemkes, 2018)	83%
17	Persentase puskesmas tanpa dokter	15% (Kemkes, 2018)	0%
18	Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat esensial	86% (Kemkes, 2018)	96%
19	Persentase obat memenuhi syarat	80,9% (BPOM, 2018)	92,3%
20	Persentase makanan memenuhi syarat	71% (BPOM, 2018)	90%
21	Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia 15 Tahun Keatas (Tahun)	8,45 tahun (Susenas 2017)	9,16 tahun
22	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	12,85 tahun (Susenas 2017)	14,16 tahun

No	Indikator	Baseline	Target 2024
23	Angka Partisipasi Kasar (Persen) a. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) b. SD/MI/ sederajat c. SMP/MTs/ sederajat d. SMA/SMK/MA/sederajat e. Pendidikan Tinggi (PT)	34,36% (Susenas 2017) 108,50% (Susenas 2017) 90,23% (Susenas 2017) 82,84% (Susenas 2017) 29,93% (Susenas 2017)	53,10% 106,71% 95,43% 84,02% 43,86%
24	Persentase anak kelas 1 SD/MI/SDLB yang pernah mengikuti pendidikan anak usia dini (TK/RA/BA/PAUD)	74,80 (Susenas, 2017)	77,78
25	Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) 20 Persen Termiskin dan 20 Persen Terkaya a. SMA/SMK/MA/Sederajat b. Pendidikan Tinggi	0,70 0,16	0,85 0,50
26	Nilai rata-rata hasil PISA: a. Membaca b. Matematika c. Sains	397 386 403	412,6 396,8 418,0
27	Proporsi Anak di Atas Batas Kompetensi Minimal dalam Test PISA (Persen): a. Membaca b. Matematika c. Sains	44,62% 31,40% 44,05%	49,80% 39,83% 48,00%
28	Proporsi Anak di Atas Batas Kompetensi Minimal dalam Test AKSI (Persen): a. Membaca b. Matematika c. Sains	53,2% 22,9% 26,4%	61,2% 30,1% 34,4%
29	Persentase Guru (TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB) yang Bersertifikat Pendidik (Persen) Persentase Satuan Pendidikan Berakreditasi Minimal B (Persen): d. SD/MI/	55,92% (Kemdikbud, 2017)	81,75%
30	e. SMP/MTs f. SMA/MA	76,84% (Kemdikbud, 2017) 70,13% (Kemdikbud, 2017) 71,01% (Kemdikbud, 2017)	84,46% 81,33% 80,86%
31	Jumlah Perguruan Tinggi Terakreditasi A	91	235
Peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda			
1	Indeks Komposit Kesejahteraan Anak (IKKA)	67,9 (2017)	81,46
2	Indeks Pembangunan Pemuda	51,50	57,67

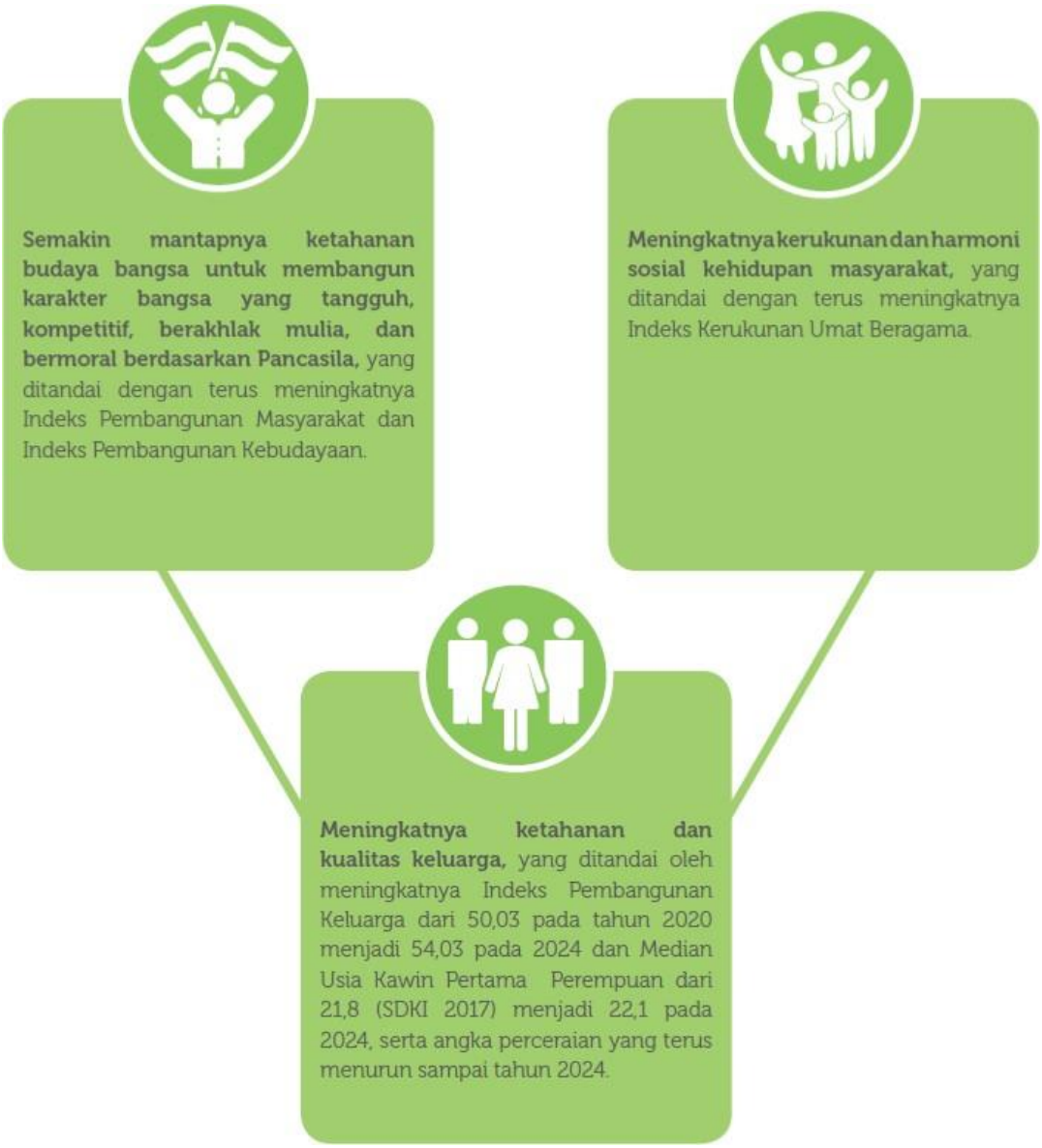
No	Indikator	Baseline	Target 2024
		(2018)	
3	Prevalensi kekerasan terhadap perempuan usia 15-64 tahun di 12 bulan terakhir	9,40 (2016)	Menurun
Pengentasan kemiskinan			
1	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang memiliki asset produktif (layanan keuangan, modal, lahan, pelatihan)	27,9%	40%
2	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang mengakses pendanan usaha	25,6%	50%
3	Jumlah bidang tanah yang diredistribusi	750.000	7.750.000
4	Jumlah bidang tanah yang dilegalisasi	6.286.087	56.286.087
Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing			
1	Persentase angkatan kerja berpendidikan menengah ke atas	41,2% (BPS, 2018)	52,1%
2	Proporsi pekerja berkeahlian menengah dan tinggi (persen)	39,57% (2018)	50%
3	Lulusan pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikat kompetensi (orang)	472.089 (BNSP, 2017)	2.000.000
4	Jumlah prodi per bidang ilmu yang dikembangkan di PT a. Sains keteknikan b. Sosial humaniora	40,9% 59,1%	50% 50%
5	Persentase lulusan PT menurut program studi a. Sains keteknikan b. Sosial humaniora	39,9% 60,1%	45% 55%
6	Persentase lulusan PT yang langsung bekerja	63% (Kemristekdikti, 2017)	80%
7	Jumlah PT yang Masuk ke dalam World Class University a. Top 100 b. Top 300 c. Top 500	- 1 (UI) 2 (ITB dan UGM)	1 2 3
8	Jumlah publikasi ilmiah dan sitasi di jurnal internasional	16.147 (Kemristekdikti, 2017)	36.500
9	Jumlah Prototipe dari Perguruan Tinggi	94 (Kemristekdikti, 2017)	243
10	Jumlah HKI yang didaftarkan dari hasil litbang Perguruan Tinggi	762 (Kemristekdikti, 2017)	1.849
11	Jumlah produk inovasi dari tenant Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi (PPBT) yang dibina	143 (Kemristekdikti, 2018)	600
12	Jumlah produk inovasi yang dimanfaatkan industri/ badan usaha	52 (Kemristekdikti, 2018)	210
13	Jumlah paten yang diberikan dan yang didaftarkan (resident)	790/1.362 (Kemhukham, 2018)	1.000/3.000

No	Indikator	Baseline	Target 2024
14	Persentase SDM Iptek (dosen, peneliti, perekayasa) Berkualifikasi S3	14,08% (Kemristekdikti, LIPI, BPPT)	20*
15	Pusat Unggulan Iptek yang ditetapkan	81 (Kemristekdikti, 2018)	138*
16	Jumlah pranata litbang yang terakreditasi (aktif)	48 (KNAPP, 2018)	75*
17	Jumlah publikasi internasional yang dapat disitasi	72.146	150.000
18	Jumlah infrastruktur Iptek strategis yang dikembangkan	6	10
19	Jumlah STP yang ada yang dikembangkan	45	8
20	Hasil inovasi Prioritas Riset Nasional	N/A	40*
21	Penerapan teknologi untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan: a. Penerapan teknologi untuk keberlanjutan pemanfaatan sumber daya alam b. Penerapan teknologi untuk pencegahan dan mitigasi pascabencana	12 35	24 35
22	Proporsi anggaran litbang terhadap PDB	0,25	0,42
23	Meningkatnya budaya dan prestasi olahraga:		
	a. Persentase penduduk berumur 10 tahun ke atas yang melakukan olahraga selama seminggu terakhir	31,39% (2018)	40%
	b. Peringkat Asian Games	Peringkat ke-4 (2018)	Peringkat ke-6 sampai ke-8 (2022)
	c. Peringkat Asian Para Games	Peringkat ke-5 (2018)	Peringkat ke-4 sampai ke-6 (2022)
	d. Jumlah perolehan medali pada Olympic Games	1 medali emas (2016)	3 medali emas
	e.Jumlah perolehan medali pada Paralympic Games	-	1 medali emas

Keterangan: *) angka kumulatif

Agenda 4. Membangun Kebudayaan dan Karakter Bangsa

- **Sasaran, Target dan Indikator**



Agenda 5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Tabel 4.4. Sasaran Dan Indikator Pembangunan Infrastruktur.

KERANGKA	SASARAN	INDIKATOR	PRO-PN
PN 5. Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar			
	Meningkatnya konektivitas nasional	Indeks Konektivitas Nasional	
	Meningkatnya indeks pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	*Information and Communication Technologies (ICT) Development Index*	
	Meningkatnya tata kelola dan pemanfaatan sumber daya air	Meningkatnya *water productivity* (GDP/m3)	
	Terpenuhinya perumahan dan permukiman layak, aman, dan terjangkau untuk rumah tangga	Persentase rumah tangga yang menempati perumahan dan permukiman yang layak, aman, dan terjangkau	
	Terpenuhinya kebutuhan energi nasional	Penyediaan energi nasional (MTOE)	
PP1. Infrastruktur Pelayanan Dasar			
	Meningkatnya akses masyarakat terhadap perumahan dan permukiman layak, aman dan terjangkau	1. Proporsi rumah tangga yang menempati hunian dengan kecukupan luas lantai per kapita (%) 2. Proporsi rumah tangga yang menempati hunian dengan ketahanan bangunan (atap, lantai, dinding) (%) 3. Proporsi rumah tangga yang memiliki kepemilikan tanah tempat tinggal (%) 4. Proporsi rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi layak dan aman (air limbah) (%) 5. Persentase penduduk yang masih mempraktekkan buang air besar sembarangan (%) 6. Proporsi rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sampah yang terkelola dengan baik (%) 7. Proporsi rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak (%)	

KERANGKA	SASARAN	INDIKATOR	PRO-PN
		8. Proporsi rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum aman (%)* (akses perpipaan)	
	Meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi	Rasio kecelakaan sektor transportasi	
	Meningkatnya pengelolaan sumber daya air secara terintegrasi	1. Meningkatnya tampungan air (alami dan infrastruktur) per kapita (m3/kapita) 2. Meningkatnya Indeks Kinerja Sistem Irigasi secara modern (%) 3. Meningkatnya luas lahan pertanian non-padi yang beririgasi (Hektare) 4. Menurunnya indeks resiko bencana untuk banjir, longsor, gunung berapi, dan gempa bumi 5. Meningkatnya bauran air baku permukaan untuk air minum (m3/detik) 6. Meningkatnya restorasi infrastruktur alami sumber air (unit) 7. Meningkatnya *water productivity index* (USD/m3)	

KERANGKA	SASARAN	INDIKATOR	PRO-PN
KP 1. Penyediaan akses perumahan dan permukiman layak, aman dan terjangkau	Meningkatnya akses masyarakat terhadap perumahan yang layak, aman, dan terjangkau	Persentase rumah tangga yang menempati seluruh aspek kelayakan dari 38,30% (2018) menjadi 52,78% (2024) **Diukur menggunakan indikator:** a. Jumlah hunian baru layak yang terbangun melalui peran pemerintah (unit) b. Jumlah peningkatan kualitas hunian melalui peran pemerintah (unit) c. Jumlah hunian yang terbangun melalui peran masyarakat dan dunia usaha (unit) d. Jumlah rumah tangga yang menerima fasilitas pembiayaan perumahan (rumah tangga) e. Jumlah kabupaten/ kota yang mengembangkan iklim kondusif perumahan melalui reformasi perizinan dan administrasi pertanahan (kabupaten/ kota) f. Jumlah kabupaten/ kota yang mengimplementasikan pemenuhan standar keandalan bangunan (kabupaten/ kota)	1. Fasilitasi Penyediaan Hunian Baru Layak 2. Fasilitasi Pembiayaan Perumahan 3. Fasilitasi Peningkatan Kualitas Rumah 4. Penyediaan Infrastruktur Dasar Permukiman 5. Fasilitasi Peningkatan Standar Keandalan Bangunan dan Keamanan Bermukim 6. Penyediaan 100.000 Unit Hunian Layak (*Major Project*)
KP 2. Penyediaan Akses Air Minum dan Sanitasi (Air Limbah dan Sampah) yang Layak dan Aman	1. Terpenuhinya akses air minum layak dan aman • Terpenuhinya 75 % akses air minum layak (termasuk 30 % akses perpipaan) • Terpenuhinya 100 % PDAM dengan kinerja sehat 2. Tersedianya sistem layanan sanitasi berkelanjutan • Terpenuhinya 90 % akses sanitasi layak (termasuk 20 % aman) • Terpenuhinya 0 % BABS	1. Jumlah sambungan rumah SPALD-T skala kota dan permukiman (SR) 2. Jumlah rumah tangga yang terlayani SPALD-S (KK) 3. Jumlah rumah tangga yang terlayani TPA dengan standar sanitary landfill (KK) 4. Jumlah rumah tangga yang terlayani TPS3R/ TPST (KK) 5. Jumlah kabupaten/kota yang memiliki sistem layanan lumpur tinja (FSM) (Kab/Kota) 6. Jumlah sambungan rumah tangga dengan akses air minum layak (SR) (akses JP susenas) 7. Jumlah rumah tangga dengan akses air minum layak (akses BJP Susenas) 8. Jumlah sambungan rumah tangga dengan akses air minum aman (akses air minum aman susenas dalam proses persiapan)	1. Pembinaan Penyelenggaraan Air Minum dan Sanitasi Layak dan Aman 2. Pengaturan Penyelenggaraan Air Minum dan Sanitasi Layak dan Aman 3. Pengawasan Kualitas Air Minum dan Sanitasi 4. Peningkatan Akses Sanitasi (Air Limbah) Layak dan Aman (*Major Project*) 5. Pembangunan 10 Juta Sambungan Rumah (*Major Project*)

KERANGKA	SASARAN	INDIKATOR	PRO-PN
	• Terpenuhinya akses persampahan yang terkelola dengan baik • Tersedianya layanan sanitasi berkelanjutan	9. Persentase PDAM dengan kinerja sehat (%) 10. Jumlah persentase angka BABS (%)	6. Pembangunan sistem pengelolaan sampah domestik
KP 3. Pengelolaan Air Tanah dan Air Baku Berkelanjutan	Tersedianya Air Baku dengan Sumber Air Terlindungi (Penambahan kapasitas air baku nasional)	1. Jumlah embung yang dibangun dan direhabilitasi 2. Panjang Jaringan Penyedia air baku yang dibangun dan direhabilitasi 3. Ketersediaan air baku di 10 wilayah Aglomerasi dan pulau-pulau kecil terluar (100 % pemenuhan ketersediaan air baku) 4. Air baku untuk kawasan pariwisata dan industri 5. Jumlah Kab/Kota dengan tingkat NRW Jaringan Transmisi Air Baku <20% 6. Cakupan Sistem monitoring jaringan perpipaan (*intake*) *real time* 7. Jumlah Wilayah Sungai yang memiliki Sistem Monitoring Debit Sungai *Real Time* yang operasional	1. Penyediaan dan Pengamanan Air Baku dan Air Tanah 2. Penyediaan Air Baku di Pulau-pulau Kecil Terluar 3. Pengelolaan Air Terpadu Berbasis Pemanfaatan Teknologi (*Smart Water Management*) 4. Pengembangan sistem informasi hidrologi, hidrometeorologi, dan hidrogeologi
	Terkendalinya Pencemaran Sumber Air baku	1. Jumlah kab/kota yang memiliki sistem teknologi pemantauan kualitas sumber air baku (air tanah dan air permukaan)	1. Pengembangan sistem pengelolaan kualitas air. 2. Penanganan limbah dan sanitasi. 3. Modernisasi pengelolaan sampah.
	Meningkatnya Penguatan Pendanaan, Regulasi, Kapabilitas dan Koordinasi Kelembagaan Air baku, dan air tanah	1. Penyelesaian UU SDA dan peraturan turunannya. (1 UU, 10 PP) 2. Ketersediaan Informasi Publik dari Sistem Informasi Terpadu Hidrologi, Hidrometeorologi, Hidrogeologi, dan Kualitas Air	Pengembangan sistem informasi hidrologi, hidrometeorologi, dan hidrogeologi
	Meningkatnya Efisiensi Pemanfaatan Air Irigasi	1. Daerah Irigasi yang mengelola data alokasi air (Peningkatan efisiensi dan efektifitas)	Pengembangan Sistem Alokasi dan Hak Guna Air Irigasi

KERANGKA	SASARAN	INDIKATOR	PRO-PN
		2. Daerah irigasi yang telah menerapkan kebijakan alokasi air irigasi tahunan 3. Daerah Irigasi yang telah menetapkan Hak Guna Air Irigasi	
KP 4. Keselamatan dan Keamanan Transportasi	Menurunnya rasio kecelakaan transportasi	1. Jumlah terjadinya kecelakaan pelayaran per tahun 2. Rasio insiden kecelakaan penerbangan per 1 juta *flight cycle* 3. Rasio kecelakaan KA per 1 juta km perjalanan KA 4. Rasio fatalitas kecelakaan jalan per 10.000 kendaraan (terhadap *baseline* 2010) (%) 5. Jumlah layanan informasi cuaca penerbangan dan pelayaran	1. Pemenuhan fasilitas keselamatan dan keamanan transportasi & SAR 2. Pembinaan dan pendidikan SDM keselamatan dan keamanan transportasi & SAR 3. Penyediaan fasilitas informasi cuaca
	Meningkatnya kinerja layanan pencarian dan pertolongan	1. Waktu tanggap pencarian dan pertolongan (menit) 2. Keberhasilan operasi SAR (%) 3. Jumlah SDM SAR yang berkompeten 4. Jumlah perlengkapan SAR (jumlah)	
KP 5. Ketahanan Kebencanaan Infrastruktur	Meningkatnya kualitas dan ketahanan infrastruktur terhadap bencana banjir, gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tanah longsor	1. Ketersediaan sistem peringatan dini bencana gempa bumi dan letusan gunung berapi (banjir lahar dingin) 2. Ketersediaan sistem peringatan dini bencana banjir dan longsor berbasis Wilayah Sungai	1. Peningkatan kualitas infrastruktur sumber daya air tangguh bencana 2. Penyediaan sistem terpadu peringatan dini 3. Pengembangan sistem tanggap darurat bencana 4. Pengembangan kebijakan penataan ruang, zonasi bencana, dan standardisasi kualitas bangunan berbasis ketangguhan bencana
	Terciptanya sistem peringatan dini dan peta risiko bencana wilayah/kawasan	1. Ketersediaan peta risiko bencana (banjir, gempa, gunung berapi, dan tanah longsor)	
	Tersedianya infrastruktur perkuatan tebing, pengamanan pantai, penahan lumpur, pengendali banjir dan longsor	1. Panjang bangunan perkuatan tebing yang dibangun atau ditingkatkan 2. Jumlah check dam yang dibangun atau ditingkatakan 3. Panjang seawall dan bangunan pengamanan pantai lainnya yang dibangun atau ditingkatkan	1. Pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur pengendali daya rusak air dan letusan gunung berapi

KERANGKA	SASARAN	INDIKATOR	PRO-PN
		4. Panjang tanggul penahan lumpur yang direhabilitasi atau ditingkatkan 5. Panjang sungai yang dinormalisasi dan tanggul yang dibangun atau ditingkatkan 6. Jumlah bangunan sabo yang dibangun atau ditingkatkan	2. Normalisasi dan penataan kawasan sempadan badan air
	Tersedianya infrastuktur pengendali banjir dan pengaman pantai di kawasan pesisir utara Pulau Jawa	1. Sungai yang dinormalisasi dan tanggul yang dibangun atau ditingkatkan di kawasan pesisir utara Pulau Jawa 2. Tanggul Laut dan bangunan pengamanan pantai yang dibangun atau ditingkatkan di kawasan pesisir utara Pulau Jawa	*Major Project*: 1. Pembangunan tanggul laut pantai utara jawa. Komponen kegiatan: Jalan Tol Semarang -Demak terintegrasi tanggul laut 2. Penanganan Krisis Air Baku di Jawa dan NTT
	Tersedianya sistem pengendalian penurunan tanah di Kab/Kota pesisir utara Pulau Jawa	1. Pemasangan alat pemantauan penurunan tanah di Kabupaten/Kota di kawasan pesisir utara Pulau Jawa 2. Pemasangan alat pemantauan penggunaan air tanah di Kabupaten/Kota di kawasan pesisir utara Pulau Jawa 3. Penegakan peraturan pengambilan air tanah di daerah teridentikasi penurunan muka tanah	
	Terjaganya kualitas lingkungan dan pencegahan pencemaran di kawasan pesisir utara Pulau Jawa (Peningkatan layanan sanitasi dan pengelolaan air)	Pembangunan stasiun pemantauan kualitas air	
	Tersedianya air bersih dari sumber air permukaan di kawasan pesisir utara Pulau Jawa	1. Peningkatan kapasitas layanan air bersih dari sumber air permukaan di kawasan pesisir utara Pulau Jawa	
	Terwujudnya pengelolaan terpadu DAS Citarum untuk mencegah kerusakan dan mengendalikan pencemaran air	1. Peningkatan jumlah titik pemantauan kualitas air di sepanjang Sungai Citarum 2. Pengurangan skor genangan banjir	1. Pengembangan sistem pengelolaan kualitas air. 2. Penanganan limbah dan sanitasi. 3. Modernisasi pengelolaan sampah. 4. Revitalisasi kawasan hulu melalui penanaman pohon dan alih profesi.
	Peningkatan pemeliharaan dan pemulihan sumber air	1. Jumlah danau prioritas yang dikonservasi 2. Jumlah rawa prioritas yang dikonservasi 3. Jumlah wilayah sungai prioritas yang dikonservasi	

KERANGKA	SASARAN	INDIKATOR	PRO-PN
			5. Penyediaan air bersih dan pengendalian debit sungai.
KP 6. Waduk Multipurpose dan Modernisasi Irigasi	Tedianya tampungan baru untuk memenuhi kebutuhan air	1. Peningkatan storage perkapita melalui pembangunan bendungan (m3/kapita) 2. Peningkatan storage perkapita melalui pembangunan embung (m3/kapita) 3. Peningkatan storage perkapita melalui utilisasi danau (m3/kapita)	Pembangunan Infrastruktur Tampungan Air Multiguna Berbasis Wilayah
	Meningkatnya fungsi bendungan	1. Bendungan mengalami penambahan fungsi listrik (MW) 2. Bendungan mengalami peningkatan fungsi air baku (m3/detik) 3. Bendungan mengalami peningkatan *live storage* (*dam upgrading*) (m3)	Pengembangan Fungsi dan Peningkatan Kapasitas Waduk
	Meningkatnya kualitas operasi-pemeliharaan dan keamanan bendungan	1. Pengurangan modified ICOLD *risk score* sebesar 20 % (Unit) 2. Peningkatan kualitas operasi dan pemeliharaan rutin (percontohan) (Unit) 3. Konservasi wilayah hulu waduk (Unit)	Rehabilitasi dan peningkatan keamanan waduk
	Tersedianya tampungan air berbasis KEK/KI	1. Dokumen resmi perencanaan pengembangan bendungan multi-guna untuk mendukung KEK/KI dan Industri Smelter (Dokumen) 2. Pilot Project pengembangan tampungan air multiguna dalam mendukung kegiatan industri (Unit)	Pembangunan Infrastruktur Tampungan Air Multiguna Berbasis Wilayah
	Meningkatnya Kualitas Irigasi Padi Eksisting (Peningkatan Indeks Penanaman)	1. Peningkatan persentase irigasi premium (%) 2. Peningkatan luas daerah irigasi teknis (Hektare) 3. Peningkatan kualitas operasi dan pemeliharaan (%) 4. *One big data* di seluruh K/L (Dokumen)	Pembangunan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Sawah
	Meningkatnya Efisiensi Irigasi Padi Melalui Penurunan Kebutuhan Volume Air per Musim	1. Modernisasi sistem irigasi berbasis teknologi (Daerah Irigasi) 2. Peningkatan cakupan luas irigasi dalam ruang lingkup aktivitas P3A (Hektare)	Peningkatan Efisiensi dan Kinerja Sistem Irigasi

KERANGKA	SASARAN	INDIKATOR	PRO-PN
	Tanam (0.5kg/m3 menjadi 0.7kg/m3 GKG)		
	Tersedianya sistem penyediaan air komoditas non-padi (produksi bernilai tinggi)	1. Lahan Perkebunan Rakyat beririgasi (Hektare) 2. Lahan Peternakan Rakyat beririgasi (Hektare) 3. Lahan Perikanan Budidaya Air Tawar beririgasi (Hektare) 4. Lahan Perikanan Budidaya Air Payau beririgasi (Hektare) 5. Lahan Tambak Garam Rakyat beririgasi (Hektare) 6. Pengembangan irigasi rawa dalam peningkatan produksi dan produktivitas pertanian (Hektare)	Pembangunan Sistem Irigasi untuk Peternakan, Tambak, dan Pertanian Non-padi
PP 2. Infrastuktur Ekonomi			
	Meningkatnya Indeks Konektivitas di wilayah	Indeks konektivitas wilayah	
KP 1. Konektivitas Transportasi Jalan	Menurunnya waktu tempuh lintas utama per pulau	1. Panjang jalan tol dan non tol yang terbangun (km) 2. Persentase kondisi mantap jalan (nasional, provinsi, kab/kota) 3. Persentase panjang jalan nasional dengan lebar memenuhi standar (%)	1. Pembangunan Jalan lintas utama pulau (trans) 2. Pembangunan jalan tol 3. Pembangunan jalan mendukung kawasan prioritas 4. Pembangunan Jalan akses simpul transportasi (pelabuhan, bandara)
	Meningkatnya aksesibilitas jalan di wilayah 3T	Panjang jalan yang dibangun di wilayah 3T	Pembangunan jalan di wilayah 3T
KP 2. Konektivitas Transportasi Kereta Api	Terwujudnya konektivitas perkeretaapaian	1. Panjang jalur KA yang dibangun (termasuk reaktivasi dan jalur ganda) 2. Persentase kondisi jalur KA dipelihara sesuai SPM *3. On Time Performance* (OTP) KA	1. Pembangunan Jalur KA utama (angkutan dan barang) 2. Pemeliharaan Jalur KA sesuai SPM
	Meningkatnya integrasi multimoda	Jumlah simpul transportasi yang terakses Kereta Api (bandara, pelabuhan, terminal)	Pembangunan Akses KA yang terhubung simpul transportasi (bandara, pelabuhan, terminal)
KP 3. Konektivitas Transportasi Laut	Meningkatnya kapasitas dan kualitas pelayanan pelabuhan laut	1. Jumlah pelabuhan utama yang memiliki kemampuan melayani kapal diatas 3500 TEUs	1. Pengembangan pelabuhan utama Tol Laut

KERANGKA	SASARAN	INDIKATOR	PRO-PN
		2. Jumlah pelabuhan yang memiliki pelayanan sesuai standar hierarki 3. Jumlah pelabuhan yang melayani kapal cruise	2. Pengembangan pelabuhan sesuai standar hierarki 3. Pembangunan pelabuhan cruise
	Meningkatnya pemanfaatan sistem teknologi informasi secara terintegrasi dan handal.	Jumlah pelabuhan yang berbasis teknologi informasi	Pengembangan teknologi informasi pelayaran
KP 4. Konektivitas Transportasi Udara	Meningkatnya konektivitas dan pelayanan transportasi udara	1. *On Time Performance* (OTP) penerbangan 2. Jumlah rute subsidi perintis penerbangan 3. Jumlah bandara di wilayah 3T	1. Jembatan Udara mendukung daerah 2. Bandara mendukung kawasan prioritas
	Meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana transportasi udara	1. Jumlah bandara yang ditingkatkan 2. Jumlah bandara baru yang dibangun	1. Pengembangan bandara Utama 2. Pembangunan bandara baru
KP 5. Konektivitas Transportasi Darat dan Antarmoda	Terwujudnya konektivitas darat yang andal	1. Persentase konektivitas Sabuk Penyeberangan Utara, Tengah, & Selatan 2. Jumlah layanan lintas penyeberangan komersial 3. Jumlah pelabuhan penyeberangan, yang dibangun/ dikembangkan 4. Jumlah kapal penyeberangan yang dibangun 5. Jumlah terminal penumpang dan barang antar Negara yang dibangun 6. Persentase kejadian pelanggaran overloading	1. Pembangunan pelabuhan penyeberangan pada Jalur utama logistik dan mendukung KSPN 2. Pembangunan terminal penumpang dan barang antar Negara 3. Pembangunan kapal penyeberangan 4. Pengembangan UPPKB
	Terwujudnya aksesibilitas darat dan antarmoda di wilayah 3T	1. Jumlah Pelabuhan penyeberangan yang dibangun di wilayah 3T 2. Jumlah rute layanan penyeberangan dan bus perintis di wilayah 3T	1. Pembangunan pelabuhan penyeberangan di wilayah 3T 2. Penyediaan subsidi perintis di wilayah 3T
PP 3. Infrastruktur Untuk Mendukung Perkotaan			
	Meningkatnya pangsa angkutan umum	1. Persentase pangsa angkutan umum (%) 2. Share PDRB per kapita dibandingkan dengan laju urbanisasi (%)	

KERANGKA	SASARAN	INDIKATOR	PRO-PN
KP 1. Sistem Angkutan Umum Masal Perkotaan	Meningkatnya Penggunaan angkutan umum massal perkotaan	1. Jumlah Penumpang pengguna angkutan Umum Massal per kota metropolitan 2. Jumlah angkutan massal berbasis rel yang dibangun (Jumlah Kota/Km/lintas/frekuensi) 3. Jumlah angkutan umum perkotaan berbasis jalan (BRT dan Sistem Transit) yang dibangun (Kota/Koridor) 4. Jumlah sarana dan prasarana serta sistem transportasi perkotaan yang terpadu (Jumlah TOD/Park and Ride/ akses) yang dibangun	1. Pengembangan Sistem Angkutan Umum Masal Berbasis Rel 2. Pengembangan Sistem Angkutan Umum Perkotaan Berbasis Jalan/BRT 3. Penyediaan subsidi angkutan umum massal perkotaan
KP 2. Infrastruktur Jalan Perkotaan	Mengurangi waktu tempuh di perkotaan	1. Jumlah jalan lingkar kota di perkotaan yang dibangun (km/kota) 2. Jumlah perlintasan tidak sebidang yang dibangun (lokasi)	1. Pembangunan *Fly Over* dan *Underpass* perkotaan 2. Pembangunan jalan lingkar tol dan non-tol Perkotaan
KP 3. Energi dan ketenagalistrikan perkotaan	Meningkatnya penggunaan energi ramah lingkungan untuk perkotaan	Persentase pengguna energi bersih di perkotaan (%)	1. Pembangunan PLTSa *2.* Pembangunan Pemanfaatan *PV Rooftop* 3. Pembangunan SPLU
KP 4. Infrastruktur dan ekosistem ICT perkotaan	1. Meningkatnya penetrasi *fixed broadband* di perkotaan 2. Meningkatnya jumlah kabupaten/kota yang menyelenggarakan layanan 112 3. Persentase kabupaten/kota terintegrasi ke sistem PPDR	1. Persentase pemanfaatan sistem layanan darurat terpadu 2. Persentase pengembangan dan pemanfaatan *sistem public protection and disaster relief* (PPDR) 3. Persentase pelanggan layanan jaringan tetap pitalebar per 100 penduduk	Pengembangan *digital technopreuneur*
KP 5. Penyediaan Akses Air Minum dan Sanitasi (Air Limbah dan Sampah) yang Layak dan Aman di Perkotaan	Tersedianya sistem layanan air minum dan sanitasi berkelanjutan	1. Sambungan rumah dengan akses air minum di wilayah prioritas (SR) 2. Presentase PDAM dengan Kinerja Sehat (%) 3. Jumlah kota yang memiliki Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik-Terpusat (SPALD-T) (unit) 4. Jumlah fasilitas pengelolaan sampah antara (unit)	1. Pembangunan SPAM Wilayah Metropolitan 2. Penyelenggaraan Layanan Air Minum dan Air Limbah yang Terintegrasi

KERANGKA	SASARAN	INDIKATOR	PRO-PN
		5. Jumlah kabupaten/kota yang memiliki layanan air minum dan sanitasi yang terintegrasi (kab/kota)	
KP 6. Penyediaan Akses Perumahan dan Permukiman Layak, Aman dan Terjangkau di Perkotaan	Meningkatnya akses masyarakat terhadap perumahan dan permukiman yang layak, aman dan terjangkau di perkotaan	Jumlah hunian baru layak yang terbangun di perkotaan (unit)	Fasilitasi Penyediaan Perumahan di Perkotaan
PP 4. Energi Dan Ketenagalistrikan			
	Meningkatnya akses dan pasokan energi dan tenaga listrik yang merata, handal, dan efisien	1. Intensitas Energi Final (SBM/ Miliar Rupiah) 2. Konsumsi Listrik Per Kapita (Rp/kWh) 3. Emisi CO_2 (juta ton)	
KP 1. Energi dan Tenaga Listrik Berkelanjutan	Memperluas penyediaan infrastruktur dan pemanfaatan energi dan tenaga listrik yang bersih dan efisien	1. Susut jaringan (%) 2. Bauran EBT di pembangkitan (%)	1. Penambahan kapasitas EBT 2. Proyek Peningkatan Pembangkit Listrik PLTA *Pumped Storage*
KP 2. Akses energi dan ketenagalistrikan	Meningkatnya akses energi dan tenaga listrik yang merata, terjangkau dan berkualitas	1. SAIDI terbesar sistem (jam/pelanggan) 2. Persentase pengguna energi bersih untuk memasak (%)	1. Penambahan Jaringan Distribusi 2. Penambahan Gardu Distribusi 3. Penurunan lama pemadaman listrik 4. Pelanggan Listrik 5. Pengembangan Kebijakan Subsidi Listrik 6. Peningkatan kehandalan sistem 7. Pengembangan Tungku Bersih Hemat Energi Rumah Tangga 8. Penyediaan tabung perdana LPG untuk memasak 9. Pembangunan Jaringan Gas Kota 10. Pengembangan Kebijakan Subsidi Energi

KERANGKA	SASARAN	INDIKATOR	PRO-PN
KP 3. Pasokan Energi dan Tenaga Listrik	Meningkatnya jaminan dan ketahanan pasokan serta kualitas tata kelola energi dan ketenagalistrikan	1. Produksi tenaga listrik (GWh) 2. Cadangan penyangga BBM (hari)	1. Penambahan Kapasitas Pembangkit 2. Penambahan Jaringan Transmisi 3. Penambahan Gardu Induk 4. Proyek Interkoneksi Kehandalan Sistem 5. Peningkatan Infrastruktur Kilang Minyak Bumi (kumulatif) 6. Kebijakan Peningkatan Tata Kelola Ketenagalistrikan
PP 5. Transformasi Digital			
	1. Terbangunnya ekosistem dan pemanfaatan TIK 2. Tersedianya layanan akses infrastruktur TIK	1. Pertumbuhan sektor informasi dan komunikasi 2. Persentase pengguna internet 3. Proporsi jumlah pelanggan *fixed broadband* *4.* Proporsi populasi yang dijangkau *mobile broadband* 5. Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam	
KP 1. Penuntasan infrastruktur TIK	Meratanya akses layanan telekomunikasi dan internet di desa	1. Persentase desa *blank spot* yang mendapatkan layanan telekomunikasi 2. Persentase penyediaan satelit multifungsi	1. Pengembangan infrastruktur pitalebar 2. Pengembangan infrastruktur penyiaran 3. Pengembangan infrastruktur TIK pemerintahan
KP 2. Pemanfaatan infrastruktur TIK	1. Meningkatnya pemanfaatan akses telekomunikasi dan internet 2. Optimalisasi pemanfaatan TIK untuk sektor pertumbuhan ekonomi strategis	1. Persentase puskesmas yang terlayani akses telekomunikasi 2. Persentase kawasan industri dan KEK yang terlayani jaringan pitalebar 3. Persentase daerah destinasi pariwisata prioritas yang terlayani jaringan pitalebar 4. Persentase kantor pemerintahan yang terlayani akses telekomunikasi (%) – kumulatif	1. Pemanfaatan TIK layanan pemerintah 2. Pemanfaatan TIK layanan masyarakat dan dunia usaha

KERANGKA	SASARAN	INDIKATOR	PRO-PN
		5. Jumlah petani dan nelayan yang bermitra dengan layanan online (orang) – kumulatif 6. Persentase penduduk yang memiliki akun uang elektronik (%) – kumulatif 7. Persentase keterpaduan aplikasi umum SPBE 8. Persentase sekolah (SMA dan SMK) yang terlayani akses telekomunikasi	
KP 3. Fasilitas pendukung transformasi digital	Meningkatnya daya saing industri dan SDM TIK dalam negeri	1. Jumlah SDM yang mendapatkan peningkatan kapasitas menghadapi transformasi digital 2. Jumlah UMKM yang menjalani bisnis online yang mendapatkan peningkatan kapasitas 3. Persentase integrasi data pemerintah 4. Persentase pengembangan platform Big Data Nasional 5. Persentase peningkatan industri perangkat TIK dalam negeri	1. Pengelolaan informasi secara aman dan terintegrasi 2. Pengembangan literasi dan keahlian TIK 3. Pengembangan dan fasilitasi industri TIK

Agenda 6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim.

- **Sasaran, Target dan Indikator**

  Sasaran, target dan indikator *outcome* untuk prioritas nasional membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim dikelompokkan sebagai berikut :



Agenda 7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

- **Sasaran, Target dan Indikator**

  Konsolidasi Demokrasi



Terbentuknya lembaga demokrasi yang efektif

Meningkatnya Skor IDI Aspek Lembaga Demokrasi



Menguatnya Wawasan Kebangsaan

- Indeks Aktualisasi Pancasila
- Pemantapan kurikulum
- Peningkatan diskursus
- Peningkatan kapasitas ASN
- Integrasi program Wawasan Kebangsaan



Terpenuhinya hak-hak politik dan terjaminnya kebebasan sipil

Pemenuhan hak politik dan jaminan kebebasan sipil:

- Skor IDI Aspek Hak Hak Politik
- Skor IDI Aspek Kebebasan Sipil
- Indeks Kerawanan Pemilu



Terwujudnya komunikasi publik yang efektif, integratif dan partisipatif

- Penguatan Tata Kelola Komunikasi dan Informasi Publik
- Peningkatan kualitas konten
- Peningkatan Kualitas SDM Bidang Komunikasi dan Informatika



Terwujudnya demokrasi yang terkonsolidasi, terpeliharanya kebebasan sipil yang tinggi, diimbangi menguatnya kinerja lembaga-lembaga demokrasi dan terjaganya hak-hak politik warga secara optimal

- Skor IDI sebesar 78,37

Tujuan pembangunan pada dasarnya harus selaras dengan tujuan nasional, sebagaimana disebutkan dalam pembukaan UUD 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Esensi dasar inilah yang dijadikan landasan dalam merencanakan pembangunan, baik pembangunan dalam skala nasional maupun lingkup daerah.

4.2. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Jangka Menengah Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021

Tujuan dan sasaran pembangunan Kalimantan Selatan adalah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kalimantan Selatan tahun 2016-2021, adalah sebagai berikut :

a. Meningkatkan daya saing sumber daya manusia;
b. Tata kelola pemerintahan yang baik;
c. Meningkatkan kesejahteraan Sosial Masyarakat;
d. Meningkatkan kualitas kehidupan yang berbasiskan kearifan lokal;
e. Meningkatkan Kehidupan kualitas masyarakat berbudaya lokal;
f. Meningkatkan penyediaan dan pemerataan pembangunan infrastruktur ke seluruh wilayah sesuai dengan tata ruang;
g. Meningkatkan daya saing perekonomian;

Sedangkan sasaran pembangunan Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

a. Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat;
b. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat;
c. Meningkatnya kualitas daya saing tenaga kerja;
d. Meningkatnya pemahaman keagamaan;
e. Meningkatnya Indeks Pembangunan dan Pemberdayaan Gender;
f. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik;
g. Meningkatnya pendanaan daerah;

h. Meningkatnya kinerja pembangunan daerah;
i. Menurunnya penyandang masalah kesejahteraan sosial masyarakat;
j. Meningkatnya ketentraman, Ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
k. Mempersiapkan terselenggaranya PON di Kalsel;
l. Meningkatkan ketahanan budaya;
m. Meningkatnya etos kerja, moralitas, sikap, disiplin, kreatipitas dan kepedulian;
n. Meningkatnya kerukunan antar dan inter umat beragama;
o. Meningkatnya kualitas budaya masyarakat;
p. Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur dasar;
q. Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur perekonomian;
r. Terwujudnya mandiri pangan dan kontribusi sektor pertanian;
s. Meningkatnya kontribusi sektor industri, perdagangan, dan jasa;
t. Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata;
u. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup daerah;

4.3. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022, yang terdiri dari Visi Kabupaten Barito Kuala "Terwujudnya Kabupaten Barito Kuala Satu Kata Satu Rasa Membangun Desa Menata Kota Menuju Masyarakat Sejahtera (Batola Setara)", akan dicapai melalui 4 (empat) Misi, 4 (empat) Tujuan dan 9 (sembilan) Sasaran pembangunan Barito Kuala Tahun 2017-2022.

Adapun tujuan pembangunan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut :

a. Meningkatkan infrastruktur wilayah yang mendukung percepatan pembangunan desa dan penataan kota yang berkualitas sesuai tata ruang;
b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui usaha pertanian dan peran sektor ekonomi lainnya;
c. Meningaktkan kualitas sumberdaya manusia;

d. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta pelayanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi.

Sedangkan sasaran pembangunan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut :

a. Meningkatnya infrastruktur wilayah dan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan kawasan permukiman;
b. Meningkatnya kualitas dan daya dukung lingkungan
c. Meningkatnya budidaya dan diversifikasi usaha sektor pertanian;
d. Meningkatnya produksi pelaku usaha dan tingkat produktivitas ekonomi masyarakat;
e. Meningkatnya pendapatan daerah dengan mengembangkan potensi lokal;
f. Meningkatnya kualitas pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat masyarakat;
g. Meningkatnya kesejahteraan dan daya saing masyarakat;
h. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah berbasis teknologi informatika;
i. Meningkatnya ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

4.4. Prioritas dan Sasaran Rencana Kerja Pembangunan Nasional Tahun 2020

Tema Pembangunan RKP 2021 adalah Meningkatkan Industri, Pariwisata dan Investasi di berbagai Wilayah didukung oleh SDM dan Infrastruktur untuk Pertumbuhan Berkualitas. Prioritas dan Sasaran Rencana Kerja Pembangunan Nasional 2020 adalah sebagai berikut :

a. 10 Desitinasi Pariwisata Prioritasm : Danau Toba, Borobodur, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likuoang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger- Semertu, Bangka Belitung, dan Morotai.
b. 9 Kawasan industry di luar jawa dan 31 smelter
c. Industri 4.0 di 5 subsektor priortas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan pakaian jadi, Otomotif, Elektronik dan Kimia.
d. Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk industry 4.0

e. Jaringan Pelabuhan Utama.

4.5. Prioritas Pembangunan Kalimantan Selatan Tema RKPD Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2020.

Tema RKPD 2020 Provinsi Kalimantan Selatan adalah Memacu Daya Saing Perekonomian yang didukung oleh Sumberdaya Manusia yang berkualitas dengan menetapkan 4 (empat) prioritas pembangunan Kalimantan Selatan Tahun 2019, yaitu :

a. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia;
b. Peningkatan daya saing ekonomi dengan memperhatikan lingkungan hidup;
c. Tata kelola pemerintahanyang baik; dan
d. Peningkatan sarana dan prasarana yang berkualitas.

4.6. Prioritas Pembangunan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2020

Dengan mengacu pada 10 (sepuluh) prioritas pembangunan jangka menengah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022, telah dirumuskan dan ditetapkan 4 (empat) prioritas pembangunan Barito Kuala tahun 2020, yaitu :

1. Percepatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dengan penerapan prinsif pembangunan berkelanjutan.

Dalam melaksanakan prioritas percepatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dengan prinsif pembangunan berkelanjutan ditetapkan dengan empat sasaran pembangunan prioritas:

1) Peningkatan Kualitas Jalan dan Jembatan
   (1) Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
   (2) Program Rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan
2) Peningkatan Akses Pelayanan Air Bersih
   (1) Program penyediaan dan pengolahan air baku
3) Peningkatan Kualitas Permukiman dan Perumahan
   (1) Program pengembangan perumahan
   (2) Program lingkungan sehat perumahan 128
   (3) Program perbaikan perumahan akibat bencana sosial.

4) Peningkatan Kualitas daya dukung lingkungan
   (1) Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
   (2) Program peningkatan pengendalian polusi
   (3) Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan
5) Peningkatan kualitas pengelolaan sanitasi limbah
   (1) Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah
6) Revitalisasi jaringan irigasi
   (1) Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya
7) Peningkatan kualitas sarana dan prasarana perhubungan
   (1) Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
   (2) Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasaran dan Fasilitas LLAJ
   (3) Program peningkatan pelayanan angkutan
   (4) Program Peningkatan dan Pengamaanan lalulintas
8) Peningkatan kualitas infrastruktur ekonomi
   (1) Program pengembangan wilayah perbatasan
   (2) Program pengembangan wilayah transmigrasi
   (3) Program perencanaan tata ruang
   (4) Program pengelolaan informasi publik
   (5) Program pengembangan fasilitas kewajiban pelayanan universal /ubniversal service obligation (KPU/USO).
   (6) Program pengembangan infrastruktur TIK
   (7) Program pengembangan Ekosistem dan Tata Kelola e-Gov.
   (8) Program penataan pengausaan, pemilikan penggunaan dan pemanfaatan tanah.
   (9) Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa.
   (10) Program kerjasama informasi dan media massa.

2. Peningkatan Produktifitas dan Daya Saing Ekonomi

Dalam melaksanakan prioritas peningkatan produktivitas dan daya saing ekonomi ditetapkan yaitu:

1) Peningkatan Pertumbuhan sektor pertanian 129
   (1) Program peningkatan Teknologi pertanian/perkebunan
   (2) Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan
   (3) Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan
   (4) Program peningkatan produksi hasil peternakan
   (5) Program pengembangan budidaya perikanan
   (6) Program pengembangan perikanan tangkap
   (7) Program Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak
2) Peningkatan Ketahanan Pangan.
   (1) Program peningkatan ketahanan pangan
3) Peningkatan Peran industry kecil dan menengah.
   (1) Program penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif
   (2) Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah
4) Peningkatan peran koperasi
   (1) Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi
5) Peningkatan nilai investasi
   (1) Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
   (2) Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
   (3) Program Penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah
6) Peningkatan daya saing tenaga kerja
   (1) Peningkatan kualitas dan rpoduktivitas tenaga kerja
7) Peningkatan pengelolaan potensi ekonomi dan keunggulan local
   (1) Program pengembangan sentra sentra industry

8) Peningkatan kesempatan kerja dan peluang berusaha

(1) Program peningkatan kesempatan kerja

3. Peningkatan kesejahteraan dan kualitas sumberdaya manusia

Dalam melaksanakan prioritas peningkatan kesejahteraan dan kualitas sumberdaya manusia ditetapkan yaitu:

1) Peningkatan rata-rata lama sekolah.

(1) Program pendidikan anak usia dini

(2) Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun 130

(3) Program pendidikan formal

(4) Program peningkatan mutu pendidikan dan tenaga pendidikan

(5) Program peningkatan budaya baca dan pembinaan perpustakaan

2) Penurunan prevalensi stunting

(1) Program upaya kesehatan masyarakat

(2) Program obat dan pembekalan kesehatan

(3) Program perbaikan gizi masyarakat

(4) Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular

(5) Program pelayanan kesehatan penduduk miskin

(6) Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya

(7) Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak

(8) Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata

(9) Program standarisasi pelayanan kesehatan

(10) Program pengadaan, peningkatan sarana parasana rumah sakit/rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata

3) Penanganan dan penurunan PMKS

(1) Program pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT) dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya

(2) Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan social

(3) Program pembinaan anak terlantar

(4) Program perlindungan dan jaminan sosial

(5) Program keluarga harapan

(6) Program sistem layanan rujukan terpadu (SLRT)

(7) Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial

4) Percepatan kabupaten layak anak

(1) Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak

(2) Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan

(3) Program keluarga berencana

(4) Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak 131

(5) Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri

5) Peningkatan dan pengembangan destinasi wisata

(1) Program pengembangan destinasi wisata

6) Peningkatan kepemilikan kartu identitas anak

(1) Program penataan administrasi kependudukan

7) Penurunan tingkat pelanggaran K3

(1) Program pemeliharaan kamtibmas dan pencegahan tindak criminal

(2) Program peningkatan pengendalian dan kenyamanan lingkungan

8) peningkatan kesejahteraan dan daya saing masyarakat

(1) Program pengelolaan kekayaan budaya

(2) program pengembangan dan keserasian kebijakan pemuda

(3) Program peningkatan sarana dan prasarana olah raga

4. Reformasi birokrasi, peningkatan pelayanan publik, peningkatan kinerja perangkat daerah dan penegakan hukum.

Dalam melaksakan prioritas reformasi birokrasi, peningkatan pelayanan publik, peningkatan kinerja perangkat daerah dan penegakan hukum ditetapkan dua sasaran yaitu:

1) Peningkatan kualitas layanan publik.
   (1) Program peningkatan layanan public
   (2) Program pendidikan politik masyarakat
   (3) Program peningkatan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
   (4) Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kepala daerah
   (5) Program pencegahan dini dan penanggulangan bencana alam
   (6) Program kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran
   (7) Program peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan agama dan pembinaan kerukunan beragama
2) Penguatan SAKIP
   (1) Program peningkatan profesianalisme tenaga pemeriksa dan apparatur pengawas
   (2) Program peningkatan layanan pengadaan barang dan jasa 132
   (3) Program penataan peraturan perundang undangan
   (4) Program perencanaan pembangunan daerah
   (5) Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah
   (6) Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah
   (7) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
   (8) Program peningkatan manajemen aset/barang milik daerah
   (9) Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
   (10) Program Perencanaan Sosial dan Budaya
   (11) Program Perencanaan Fisik dan Prasarana

(12) Program pembangunan infrastruktur perdesaaan

(13) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

3) Sinkronisasi dana desa

(1) Program peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan

(2) Program pengembangan lembaga ekonomi perdesaan

(3) Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa

4) Peningkatan disiplin ASN

(1) Program pendidikan kedinasan

(2) Program pembinaan dan pengembangan aparatur

Dalam mewujudkan peningkatan prioritas reformasi birokrasi, peningkatan pelayanan publik, peningkatan kinerja perangkat daerah dan penegakan hukum didukung oleh 37 program prioritas dan 1.273 kegiatan.

BAB V. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Sebagaimana telah diuraikan pada bagian awal dari dokumen ini bahwa Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) dilakukan dengan memperhatikan evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2020 yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :

a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan kerangka pendanaan, sasaran pembangunan, dan rencana kegiatan;
b. Keadaan yang menyebabkan SILPA tahun sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;
c. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; Pandemi Covid-19 yang telah melanda Dunia secara global memaksa pemerintah merubah berbagai kebijakan, tidak terkecuali kebijakan keuangan untuk melakukan pencegahan penyebaran sekaligus menanggulangi dampak-dampak dari serangan virus Covid-19 ke masyarakat.
d. Pergeseran pagu kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternative, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan;
e. Dalam hal darurat sebagaimana ditetapkan dalam peraturan dalam peraturan-perundangan, pemerintah daerah dapat melaksanakan kegiatan terlebih dahulu untuk mengatasi keadaan darurat dimaksud dan selanjutnya ditampung dalam perubahan RKPD Tahun 2020;
f. Rencana Kegiatan DAK Tahun 2020 yang disesuaikan dengan RKPD Tahun 2020;
g. Implementasi palaksanaan Tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai berbasis kinerja pada tahun 2020 perlu disesuaikan dalam RKPD 2020.
h. Implementasi pelaksanaan Peraturan Presiden R.I. Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan bahwa Jumlah Minimal kepersertaan JKN-KIS adalah 95 % dari Populasi Kabupaten dan masih terdapat sebesar 45,37% penduduk Barito Kuala yang belum memiliki Jaminan Kesehatan.

Program dan kegiatan prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan (pagu indikatif) selanjutnya dijadikan acuan bagi perangkat daerah dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah. Rencana kerja berupa program dan kegiatan pembangunan seluruh perangkat daerah sebagai instrumen pelaksanan dari program perangkat daerah Tahun 2020 yang disajikan pada Lampiran 1 yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan RKPD-P Kabupaten Barito Kuala Tahun 2020 ini.

BAB VI. PENUTUP

Dasar–dasar dalam menetapkan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Penetapan Plapon Anggaran Sementara Perubahan (KUPA – PPAS-P) tahun 2020, yang selanjutnya menjadi Rancangan APBD Perubahan Kabupaten Barito Kuala tahun 2020 adalah Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan (RKPD-P). Seluruh kebijakan dan program yang tercantum dalam RKPD Perubahan tahun 2020 ini selanjutnya akan dilaksanakan oleh perangkat daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Barito Kuala melalui penyusunan Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) perangkat daerah dengan menerapkan sistem perencanaan dan penganggaran yang terpadu, perencanaan berbasis kinerja dan penganggaran jangka menengah.

Dokumen RKPD Perubahan Kabupaten Barito Kuala tahun 2020 ini akan menjadi instrumen utama bagi seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Barito Kuala dan stakeholder terkait dalam meningkatkan kinerja pembangunan melalui pembenahan administrasi pemerintahan dan peningkatan jangkauan dan mutu pelayanan kepada masyarakat. Walaupun berbagai tantangan yang dihadapi pada tahun 2020 terasa berat, khususnya pada sektor perekonomian yang terpuruk sebagai dampak dari Pandemi Covid-19, Pemerintah Kabupaten Barito Kuala terus berusaha mengatasi tantangan tersebut dengan bekerja lebih keras dan cerdas serta lebih bijak, memperkuat koordinasi dan sinergi seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Barito Kuala dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan Pemerintah Pusat, meningkatkan partisipasi masyarakat dan membangun kerjasama yang memberikan manfaat dengan seluruh pihak yang terkait termasuk dunia usaha. Semoga upaya-upaya yang telah dan akan dilakukan pemerintah Kabupaten Barito Kuala dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Barito Kuala.

Marabahan, Juli 2020

BUPATI BARITO KUALA,

Hj. NOORMILIYANI. AS